

# MENELISIK KORUPSI ANGGARAN PUBLIK 2013

**Kumpulan  
Liputan Isu  
Anggaran**

KEGIATAN INI DI DUKUNG OLEH



**USAID | INDONESIA**

DARI RAKYAT AMERIKA

PROGRAM REPRESENTASI (PROREP)

**MENELISIK KORUPSI ANGGARAN PUBLIK 2013**  
KUMPULAN LIPUTAN ISU ANGGARAN

**PENULIS:**

Abdul Hakim  
Adhar Muttaqin  
Andika Destika Khagen  
Bhekti Suryani  
Deni Bachtiar  
Fathul Mu'in  
Gatot Arifianto  
Gusti Ayu Gayatri  
Heditia Damanik  
Muhammad Ulul Hadiyin

**EDITOR KOMPILASI:**

Arfi Bambani

**DESAIN DAN TATA LETAK:**

jabrik.com

**DITERBITKAN OLEH:**

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) INDONESIA)  
Jalan Kembang Raya No. 6 Kwitang, Senen  
Jakarta Pusat 10420 Indonesia  
Email: [Office@ajiindonesia.or.id](mailto:Office@ajiindonesia.or.id)  
Website: [www.ajiindonesia.or.id](http://www.ajiindonesia.or.id)

**DIDUKUNG OLEH:**

PROREP - USAID

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar ProRep.....	5
Kata Pengantar Aji.....	7
Catatan Editor.....	11
<b>Andika Destika Khagen</b>	
“Bumerang” Jalan Raya.....	17
<b>Gusti Ayu Gayatri</b>	
Tinggi Kuantitas, Minim Kualitas .....	25
Perda Mandul, Ratusan Juta Terbuang.....	30
<b>Muhammad Ulul Hadiyin</b>	
Dana BSM Sudah di Tangan Tapi Melayang.....	35
<b>Adhar Muttaqin</b>	
Ironi Guru Sertifikasi .....	41
<b>Gatot Arifianto</b>	
Anggaran dan Problematika Pendidikan Kabupaten Waykanan .....	47
<b>Bhukti Suryani</b>	
Berebut Anggaran Hibah-Bansos.....	59
Dana Cair Jangan Lupa Coblos.....	65
Korupsi Politik Di Hibah-Bansos.....	69
<b>Heditia Damanik</b>	
Bansos Panadol Pemprov yang Tak Manjur.....	73
<b>Abdul Hakim</b>	
Mengurai Bau “Busuk” Penganggaran TPA Benowo Surabaya.....	85
<b>Fathul Mu’in</b>	
KPU dan Bawaslu Tidak Transparan.....	99
Bawaslu Siap Tanggung Jawab Dana Rp49 Miliar .....	101
Maksimalkan Fungsi Website .....	103
<b>Deni Bachtiar</b>	
Hasil Proper Test BLH Jatim dan KLH RI.....	107
RSU dr Soetomo Tak Prioritaskan Kelola Limbah .....	110
Sampah RSU dr Soetomo Kembali Menggunung.....	114



# KATA PENGANTAR

**B**uku ini merupakan buku kedua dari kumpulan tulisan para jurnalis anggota AJI yang telah memperkuat kemampuannya dalam mengenali proses penganggaran, dan menurunkan berbagai berita mengenai pelaksanaan proses perencanaan dan penganggaran yang terjadi di berbagai sektor dengan analisis yang lebih tajam dan berdasar.

Undang-Undang no. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengharuskan Pemerintah Indonesia mulai mengganti system penganggaran konvensional (system yang berbasis *line item*) dengan penganggaran berbasis kinerja (PBK), yang selama decade terakhir telah dilaksanakan Pemerintah Indonesia. Teori PBK sebetulnya relative sederhana, dan bisa diterangkan sebagai upaya untuk membuat ikatan yang kuat Antara jumlah anggaran yang direncanakan dengan jumlah out put atau keluaran yang hendak dicapai. Termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.

Dengan mendefinisikan hasil program secara jelas ketika merancang program dan menyusun anggaran, pelaksana program mestinya lebih mampu menentukan apakah program mereka berhasil, apakah biaya sesuai dengan anggaran. Mereka juga mestinya bisa lebih memahami mengapa suatu program terlaksana atau tidak terlaksana seperti yang diharapkan.

Meskipun teori Penganggaran Berbasis Kinerja sederhana, melaksanakannya tidaklah mudah. Sebagaimana Negara-negara lain yang melaksanakan PBK, Indonesia menghadapi

tantangan ketika berusaha melakukannya, salah satunya korupsi, dan tahun lalu, Transparansi International Indonesia menempatkan Indonesia pada nomor 56 dalam daftar negara paling korup.

Protret buram atas kenyataan ini adalah cermin atas segala upaya yang telah dilakukan oleh banyak kalangan. Artinya, proses kontinum yang sinergis adalah sebuah keharusan dan perlu diupayakan secara terus menerus. Dalam konteks ini, kehadiran kelompok jurnalis yang peduli terhadap proses anggaran adalah pompaan semangat baru. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) kembali memulai mengajak anggotanya untuk sama-sama mengawasi proses penganggaran. Upaya ini telah dimulai AJI beberapa tahun silam. Proses ini sempat terhenti karena berbagai kendala, namun tahun 2012 semangat AJI bangkit kembali. Dengan dukungan ProRep, AJI mengajak anggotanya untuk sama-sama mengawasi proses penganggaran. Kali ini dengan pendekatan yang lebih strategis, yakni dengan terlebih dahulu memperkuat kemampuan para anggotanya dalam mengenali proses penganggaran. Dengan demikian analisis para jurnalis ini terhadap proses perencanaan dan penganggaran menjadi lebih tajam dan berdasar.

Dengan kehadiran buku ini, dan dengan upaya AJI menyebarluaskan pengetahuan mengenai penganggaran berbasis kinerja melalui berbagai saluran, semoga pengawasan masyarakat terhadap implementasi penganggaran meningkat dan dapat memperbaiki protret negeri ini dalam penggunaan keuangan Negara. Selamat kepada AJI atas langkah penting ini yang semoga menjadi bola salju bagi gerakan masyarakat untuk lebih masif mengawasi penggunaan uang publik.

**John K. Johnson,**  
Chief of Party ProRep

# KATA PENGANTAR

**T**ransparansi adalah ujung tombak dari kebebasan pers. Tanpa transparansi, kebebasan pers seperti pensil tumpul yang kehilangan *arang*.

Kalimat di atas adalah untuk menggambarkan pentingnya program pelatihan dan workshop isu Transparansi Anggaran bagi anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Program yang bermanfaat bagi jurnalis ini berlangsung atas dukungan Pro-Rep USAID yang menjadi mitra strategis AJI dalam dua tahun awal kepengurusan AJI periode 2011-2014.

Buku berjudul “Menelisis Korupsi Anggaran Publik” ini merupakan kompilasi liputan terbaik program Transparansi Anggaran jilid ke-2 (periode Mei 2013 sampai Januari 2014) yang dijalankan AJI di lima kota : Lampung, Kediri, Padang, Surabaya, Yogyakarta. Program serupa jilid pertama (periode Maret 2012 sampai Agustus 2012), berlangsung di tiga kota : Padang, Yogyakarta, Surabaya, serta menghasilkan buku kompilasi yang sama.

Pelatihan isu Transparansi Anggaran jilid 2 berjalan lancar di kota-kota yang dipilih AJI Indonesia. Diawali dengan Training of Trainers (ToT) bagi jurnalis senior perwakilan AJI Kota, kemudian dibuka rekrutmen untuk jurnalis anggota AJI dan non-AJI sebagai peserta pelatihan. Untuk Lampung dan Kediri, dua kota yang baru bergabung dalam pelatihan jilid 2 ini, peserta yang terjaring dalam rekrutmen, mengikuti training transparansi anggaran yang lebih umum. Sedangkan

di tiga kota lain, yaitu: Padang, Yogyakarta, dan Surabaya, peserta harus mengikuti kursus singkat (short course) agar lebih detil/khusus memahami anggaran.

*Short course* anggaran ini bentuknya seperti diskusi melalui delapan kali pertemuan intensif. Pada pertemuan ke-6 dan ke-7, peserta diminta membuat tugas akhir yg nantinya akan dimuat pada media masing-masing. Dari pemuatan media itulah dinilai dan dipilih dua karya atau laporan jurnalistik terbaik, yang sekarang dibukukan.

Pelatihan dan workshop program Transparansi Anggaran bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan (meliput-menulis) anggota AJI dalam melaporkan isu transparansi anggaran. Ini sekaligus menegaskan fungsi pers sebagai watchdog (anjing pengawas) independen, sekaligus memperluas partisipasi publik dalam mengawasi kekuasaan pemerintah.

Sepuluh laporan terbaik para jurnalis eks-peserta pelatihan dipilih mewakili karya-karya lainnya yang terpublikasi di berbagai media sepanjang 2012-2013. Selain bisa menggenjot pemberitaan dalam isu transparansi, media berhasil menambah ketertarikan publik terhadap isu transparansi, yang biasanya dikaitkan dengan kasus penangkapan tersangka koruptor oleh aparat penegak hukum (KPK).

Meningkatnya isu Transparansi Anggaran (dan kasus Korupsi) ke permukaan secara perlahan mendorong instansi pemerintah, di pusat maupun daerah, berlomba-lomba menampilkan aspek transparansinya terhadap publik. Contoh paling mudah, adanya iklan pelelangan proyek infrastruktur dari berbagai dinas dan kementerian di sejumlah media cetak nasional, hingga munculnya website pemerintahan yang menampilkan wajah keterbukaan dan pelayanan publik.



Memang itu semua masih jauh dari kesadaran pentingnya transparansi dan sikap antikorupsi. Namun beberapa indikator yang muncul mengarah kesana.

Setidaknya berdasarkan temuan Open Budget Index (OBI) 2013 yang diluncurkan International Budget Partnership 23 Januari 2013, peringkat transparansi anggaran Indonesia mengalami kenaikan dari angka 51 (2010) menjadi 62 pada 2012. Mengutip Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yuna Farhan, skor 62 itu menunjukkan transparansi anggaran Indonesia berada pada kategori penyediaan informasi anggaran secara substansial, dan menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang transparan di Asia Tenggara.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada para jurnalis peserta pelatihan dan selamat kepada mereka yang karyanya dibukukan dalam kompilasi Menelisik Korupsi Anggaran Publik produksi AJI Indonesia - ProRep USAID. Kepada semua pihak yang ikut melancarkan program yang bermanfaat ini AJI Indonesia menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya.

**Eko Maryadi**  
Ketua Umum AJI



# CATATAN EDITOR

**S**epuluh karya investigasi mengenai anggaran ini menarik-menarik. Beberapa tulisan muncul dengan sudut cerita yang tak disangka-sangka ternyata juga berkaitan dengan masalah politik anggaran.

Sebagian besar penulis berhasil “membangkitkan” tema besar anggaran yang terkesan penuh dengan angka-angka menjadi cerita yang “basah” dan dekat dengan keseharian kita.

Mungkin tak banyak yang menyadari, problem kemacetan jalan raya juga bagian dari problem ketidakadilan anggaran. Namun, Andika D Khagen, jurnalis dari Padang, menemukan benang merah antara kedua masalah itu. Andika dengan apik “memotret” sebuah kemacetan jalan raya untuk membuka cerita tentang politik anggaran yang tak menyentuh persoalan riil masyarakat.

*“Pertumbuhan jumlah kendaraan itu tak diiringi dengan penambahan ruas jalan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Padang Herman Peri mengatakan, tidak ada penambahan ruas jalan kurun waktu 5 tahun, meskipun anggaran untuk penambahan itu selalu diusulkan. Yang dilakukan hanya memperlebar jalan, tambal sulam, seperti yang dilakukan di Jalan Ampang dan membuka ruas jalan baru di Siteba.”*

Maka tak mustahil, Andika menulis, jika setiap hari, di ruas-ruas jalan utama Kota Padang, kemacetan menjadi kenyataan yang tak dapat dielakkan.

Ketidaksinkronan peruntukan anggaran dengan kebutuhan publik di Kota Padang dibuktikan pula oleh rekan Andika sesama dari Padang, Gusti Ayu Gayatri. Jika Andika memotret secara mikro, Gusti Ayu mengambil "gambar lansekap" dengan melihat proporsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang. Gusti Ayu menemukan, ada fenomena "Proyek Rancangan Peraturan Daerah" yang bisa menghabiskan anggaran miliaran rupiah setiap tahunnya. Dan Gusti Ayu menyimpulkan, mayoritas hasilnya adalah peraturan daerah tanpa "gigi", tak bisa dilaksanakan.

## **KORUPSI PENDIDIKAN**

Sementara dua jurnalis dari Kediri fokus di isu pendidikan. Hadi Kusuma mengupas soal bantuan siswa miskin (BSM), sementara Adhar Muttaqin mengenai program guru bersertifikasi. Cerita Hadi Kusuma sudah bisa ditebak, ada dugaan korupsi dalam pengelolaan BSM.

*"Pelaksanaan program BSM untuk siswa tingkat SMP di Kota Kediri sangat janggal dan jelas menyalahi petunjuk teknis. Selain tidak ada sosialisasi dana BSM siswa miskin ini oleh sekolah disimpan di bank, penggunaannya pun tidak diserahkan langsung ke masing-masing siswa penerima. Laporan rincian penggunaan dana yang menjadi hak siswa miskin tersebut juga tidak jelas,"* Hadi menulis.

Sementara Adhar menyigi dengan seksama "korupsi" yang muncul dari program guru bersertifikasi.

Aturan pemerintah pusat yang mewajibkan guru bersertifikasi mengajar 24 jam sepekan, menurut Adhar, memaksa guru berjampalitan memenuhi kewajiban tersebut dengan mengajar di sekolah lain.

*"Minimnya transportasi dan sulitnya medan di kawasan pegunungan membuat para guru di sana pun mengakali aturan itu*

*dengan memadatkan jam belajar. Jika jam belajar tidak terpenuhi maka tunjangan bisa dihentikan. Agar tidak ketahuan pengawas dinas pendidikan, biasanya para guru memadatkan jam kerja dengan cara saling tukar dengan guru yang lain. Sedangkan jadwal mengajar yang ditetapkan sekolah tidak mengalami perubahan.”*

Dan hasilnya, menurut temuan Adhar, alih-alih sertifikasi meningkatkan mutu pendidikan, justru yang terjadi sebaliknya. Tak ada peningkatan kualitas pendidikan di Kediri setelah program sertifikasi berjalan.

Gatot Arifianto, jurnalis dari Lampung, mencoba pula membedah anggaran pendidikan di Kabupaten Waykanan. Sayang, Gatot tak membongkar detail bagaimana pelaksanaan lapangan dari anggaran yang lebih dari 30 persen APBD itu.

## **“KORUPSI POLITIK”**

Tema ini ditulis oleh Bhekti Suryani, jurnalis dari Yogyakarta. Dalam sejumlah artikel yang diterbitkan oleh koran tempat dia bekerja, tergambar ketegangan antara partai-partai politik dalam “memperebutkan” anggaran bantuan sosial yang dikenal juga sebagai “dana aspirasi” di Kabupaten Bantul. Sikut-sikutan ini menguat karena ada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mulai 2013 ini memperketat penyaluran dana bansos dengan mensyaratkan harus ada proposal awal.

Dan Bhekti menceritakan, setiap menjelang Pemilu, dana bansos ini selalu menggelembung. Namun kali ini, karena ada Peraturan Mendagri, sebagian besar rancangan dana bansos harus dipotong. Persoalannya, politisi dari partai-partai “oposisi” merasa “bagian” mereka yang banyak dipotong. Tuding-menuding antara dua kubu pun terjadi. Bhekti sangat berhasil menceritakan itu.

Heditia, jurnalis yang juga dari Yogyakarta, mengangkat tema dana bansos pula. Jika Bhekti mengangkat sisi “politik” dalam penganggarannya, Heditia mencoba fokus pada sisi pelaksanaannya. Dan temuan Heditia juga menarik, dana bansos di Kota Yogyakarta tak berhasil mencapai target. Belum lagi, ada temuan dana bansos justru diterima orang yang sebenarnya mampu secara ekonomi.

Soal politik penganggaran juga menjadi bidikan Abdul Hakim, dari Surabaya. Hakim bercerita mengenai pengelolaan tempat pembuangan sampah akhir di Kota Surabaya yang misprosedural sehingga ditengarai merugikan keuangan negara.

Sementara Fathul Mu’in, dari Lampung, membahas soal transparansi anggaran di dua lembaga negara yang mengurus Pemilu. Sayangnya, Fathul lebih fokus pada isu transparansi anggaran, bukan bagaimana pelaksanaan anggaran di lapangan.

Kemudian, terakhir, Deny Bachtiar, jurnalis dari Surabaya, mengangkat kisah pengelolaan rumah sakit umum di Surabaya yang gagal memenuhi standar lingkungan tertentu. Deny mencoba mengaitkan isu ini dengan politik penganggaran, namun terkesan memaksakan. Justru yang terlihat dari tulisan Deny, rumah sakit tersebut punya masalah kekurangan anggaran, bukan masalah mismanajemen.

## **EVALUASI TULISAN**

Sebagian besar hasil investigasi sukses diceritakan dengan memikat khas berita kisah (*feature*) atau *indepth reporting*, meski ada juga yang menampilkannya seperti *hard news* biasa. Namun tentu para penulis dengan gaya “hard news” ini perlu memikirkan bagaimana membuat pembaca betah membaca

laporan investigasi mereka.

Secara isi, sebagian besar tekun dalam membongkar tema yang mereka tulis, terlihat dari data, narasumber dan angka-angka yang mereka sajikan. Namun ada juga yang terkesan apa adanya, dengan data yang minim dan bahkan narasumber yang sebenarnya tidak relevan dengan tema tulisan.

Secara teknis, ada beberapa hal yang mengganggu dalam penulisan laporan ini. Salah satunya, bagaimana sebaiknya menyajikan angka-angka sehingga tidak memusingkan pembaca. Ada yang cerdas, menyajikan angka-angka tersebut dalam satu boks terpisah berupa tabel atau grafis. Namun sebagian besar memilih mengumbar angka-angka itu begitu saja tanpa memikirkan faktor kenyamanan membaca.

Namun demikian, terlepas dari sejumlah evaluasi ini, sepuluh karya investigasi ini layak dibaca. Dan bahkan, beberapa di antaranya jangan sampai Anda lewatkan.

Jakarta, 11 Desember 2013

**Arfi Bambani**



**ANDIKA DESTIKA KHAGEN.** Redaktur Pelaksana di Klikpositif.com, media online di Sumatra Barat. Pria asal Pangkalan, Kabupaten Lima Puluh Kota yang lahir di Padang, 8 Mei 1985 ini sudah aktif di dunia jurnalistik sejak kuliah di Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang, dan menjadi Pemimpin Redaksi SKKGanto UNP (2008).

Menyukai sastra, pria yang tengah menempuh program magister Jurusan Linguistik di Universitas Andalas ini juga sering memenangkan lomba penulisan cerita pendek diantaranya Juara III Lomba Cerpen yang diselenggarakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Sumatera Barat, 2008. Juara Harapan I Lomba Cerpen dalam acara Pekan Seni Mahasiswa Nasional di Jambi, 2008. Juara III Lomba Cerpen Nasional yang diselenggarakan oleh Persma Suara USU, 2009. Juara II Lomba Cerita Anak yang diselenggarakan oleh Badan Perpustakaan dan Kearsipan Sumbar, 2009.

Saat ini, Andika menjadi Koordinator Divisi Etik, Pendidikan dan Profesi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang. Aktif dalam sejumlah advokasi jurnalis dan media di Padang sejak 2012, Andika juga terlibat dalam menulis buku Memahami Hukum Pers terbitan LBH Pers Padang tahun 2013. Saat ini sedang menyelesaikan studi di pascasarjana Universitas Andalas.



# “BUMERANG” JALAN RAYA

Jalan raya itu bumerang: objek penghasil uang sekaligus penebar maut.

**A**ri Novrizal, 27 tahun, geleng-geleng kepala ketika melewati lampu merah di Simpang Alai, sekitar 500 meter dari Gelanggang Olah Raga Haji Agus Salim Padang. Ketika *traffic light* berganti warna hijau, ia mulai menekan gas dan melambatkan laju kendaraan. Pada saat bersamaan, di persimpangan yang terletak persis di depan pasar satelit itu, muncul kendaraan lain menerobos lampu merah.

Awalnya hanya satu sepeda motor. Tak berselang lama, diikuti pengendara lain. Kendaraan yang baru lepas dari “jebakan” lampu merah, kembali berhenti persis di tengah-tengah badan jalan. Dari arah yang lain, muncul motor, mobil, menyesaki badan jalan. Hitungan detik, ratusan kendaraan terjebak di tengah-tengah jalan dan tak bisa lagi melaju.

“Ini nyaris saya alami tiap hari,” ujar Ari, yang sehari-hari bekerja menjadi pengajar di salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Padang. Meski berjarak 100 meter dari kantor polisi, namun tak ada polisi sore itu yang berniat menyelesaikan kemacetan.

Menurut Ari, Simpang Alai hanya salah satu ruas jalan tempat terjadinya kemacetan. Sebelum sampai ke kampus di

Air Tawar, ia terjebak lagi kemacetan di Jalan Hamka, dekat mal dan hotel Basko. "Sekali macet, bisa ratusan kendaraan di belakang saya," ujarnya.

Pantauan *KLIKPOSITIF*, kemacetan juga sering terjadi di sepanjang Jalan *By Pass*, Jalan Andalas, kawasan Lubuk Buaya, kawasan Limau Manis, dan kawasan Jati. Nyaris tiap hari.

Sugeng Riyadi (26 tahun), yang sehari-hari bekerja di *bidang keuangan* pernah mengalami kejadian yang membuatnya nyaris mengalami kematian. Di Jalan *By Pass*, saat sepeda motornya sedang melaju menuju arah Lubuk Begalung, "Tiba-tiba ada sepeda motor menabrak saya dari belakang," ujarnya. Kondisi jalan *By pass* ketika itu, sebutnya, disesaki banyak kendaraan. Akibat tabrakan itu, Sugeng Riyadi terpental sekitar 200 meter. Ia dirawat sekitar 15 hari di rumah sakit. Ia bersyukur kepalanya tidak terhempas ke jalan karena dilindungi oleh tangannya.

Sugeng menuturkan penabraknya tidak mampu mengendalikan kendaraan karena pada saat bersamaan ada mobil dengan kecepatan tinggi menyerempetnya tiba-tiba. Ia kehilangan kendali dan akhirnya menabrak Sugeng.

Kondisi jalan raya yang padat, salah satu dari banyak faktor tingginya angka kecelakaan. Pengamat transportasi dari Universitas Bung Hatta, Fidel Miro, mengatakan, ruas jalan yang ada di banyak kota, termasuk Padang, tak mencukupi lagi menampung tingginya penambahan jumlah kendaraan, entah itu mobil atau motor. Perilaku pengendara, menurut Fidel Miro, hal lain yang sering menjadi pemicu tingginya angka kecelakaan.

Kota Padang merupakan daerah yang angka kecelakaannya nomor satu di Sumatera Barat, peringkat 16 secara nasional. Kepala Subdirektorat Pendidikan dan Rekayasa Direktorat

Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumbar, Ajun Komisaris Besar Dwi Sulistyawan, mengatakan, selama 2012, kecelakaan di Sumbar 3.198 kasus.

Kota Padang menempati peringkat pertama dengan 540 angka kecelakaan, 80 korban meninggal dunia. Disusul Kabupaten Padangpariaman dengan 315 kasus kecelakaan dan Kota Pariaman “menyumbang” angka 275 kasus selama 2012.

Sebagai perbandingan, pertumbuhan jumlah kendaraan pada tahun 2012, 302 ribu untuk kendaraan roda dua, 109 ribu untuk kendaraan roda empat. Menurut catatan Satuan Lalu Lintas, saat ini di Kota Padang terdapat ratusan ribu kendaraan roda dua dan empat. “Sama artinya, satu penambahan sepeda motor satu kecelakaan lalu lintas,” ujarnya.

Pertumbuhan jumlah kendaraan itu tak diiringi dengan penambahan ruas jalan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Padang Herman Peri mengatakan, tidak ada penambahan ruas jalan kurun waktu 5 tahun, meskipun anggaran untuk penambahan itu selalu diusulkan. Yang dilakukan hanya memperlebar jalan, tambal sulam, seperti yang dilakukan di Jalan Ampang dan membuka ruas jalan baru di Siteba.

Maka tak mustahil, jika setiap hari, di ruas-ruas jalan utama Kota Padang, kemacetan menjadi kenyataan yang tak dapat dielakkan. Padahal Padang hanya sebuah kota kecil, dengan jumlah penduduk 871.534 jiwa, minus sebelas kali lipat dari banyaknya penduduk di Jakarta yang 10.187.595 jiwa.

## **SURAT EDARAN BIYANG TAK BERARTI**

Pemerintah sadar, jumlah kendaraan yang tak seimbang dengan infrastruktur memiliki risiko kecelakaan yang tinggi. Pada 15 Maret 2012, Bank Indonesia menaikkan *down*

*payment* (uang muka) kredit kendaraan bermotor menjadi 25 persen untuk roda dua, kendaraan roda empat sebesar 30 persen.

Di Kota Padang, sebelum Surat Edaran Bank Indonesia ini diberlakukan, kendaraan bermotor roda dua dan empat tahun 2010 berjumlah 171.600 unit. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk, delapan orang memiliki satu buah kendaraan bermotor.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Raju Minpora Chaniago, pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Padang sekitar 302 ribu untuk kendaraan roda dua, 109 ribu untuk kendaraan roda empat tiap tahunnya.

Pada 2015, kemungkinannya, tiga orang untuk satu kendaraan. Asumsinya, hasil sensus penduduk 2000-2010, jumlah penduduk meningkat dengan rasio 2,3 persen. Di Sumbar, lonjakannya lebih tinggi, 3,4 persen. Artinya, penduduk di Indonesia bertambah 6 juta tiap tahun. Asumsinya lagi, satu orang keluarga memiliki lebih dari dua orang anak.

Data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik menunjukkan angka belum ampuhnya Surat Edaran Bank Indonesia. Dalam Data Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan (RUJTJ) Kota Padang Tahun 2004-2013 menunjukkan kejadian yang berbaillik: jumlah angkutan umum menurun, sementara angkutan pribadi semakin meningkat.

Penggunaan moda transportasi angkutan umum pada tahun 2004 berjumlah 53 persen dari seluruh perjalanan. Akan tetapi, penggunaan angkutan umum mengalami penurunan sejak tahun 2005 sehingga pada tahun 2012 turun menjadi 45,47 persen. Sedangkan penggunaan kendaraan pribadi meningkat tajam dari 47 persen pada tahun 2005 menjadi 54,53 persen pada tahun 2012.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Raju Minpora Chaniago, mengatakan, dilihat dari penambahan jumlah kendaraan, Surat Edaran Bank Indonesia yang mewajibkan uang muka 25-30 persen, belum menunjukkan hasil.

## **HANYA 5 PERSEN YANG DIPERBAIKI**

Kendaraan bermotor sumber pendapatan terbesar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) tiap tahun. Data Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD), pada 2011, sumber pajak dari kendaraan bermotor tercatat Rp587,3 miliar, atau berhasil melebihi target Rp520,9 miliar.

Pada 2012, pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor naik lagi menjadi Rp637,5 miliar. Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, mengatakan, karena tiap tahun pendapatan dari pajak kendaraan bermotor meningkat, Pemda menaikkan lagi targetnya untuk tahun 2013. "Kami menargetkan kenaikannya sebesar Rp396 miliar lagi," ujarnya.

Di Sumbar, sebut gubernur, total pajak daerah pada 2013 ditargetkan Rp1,035 triliun atau 80,7 persen dari total penerimaan PAD yang ditetapkan sebesar Rp1,283 triliun. Target itu bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp396,11 miliar, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp396,9 miliar, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp234,72 miliar.

Tapi, besarnya pendapatan dari pajak kendaraan bermotor tak sebanding dengan penambahan ruas jalan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Padang, Hermen Peri, mengatakan, belum ada penambahan ruas jalan kurun 5 tahun belakangan. Penambahan ruas jalan baru dimasukkannya dalam program kerja jangka panjang PU Padang 2014-2017.

"Kondisinya sekarang, ruas jalan di Kota Padang justru

banyak yang rusak, terlebih sejak gempa 30 September 2009,” ujarnya kepada *KLIKPOSITIF*, Jumat, 8 November 2013. Jalan yang rusak itu 60 persen dari total panjang jalan 2.312.800 km.

Menurut Herman Peri, baru 5 persen perbaikan dari total ruas jalan yang rusak pada 2013. “Kami terkendala dengan anggaran untuk perbaikan jalan ini,” ujarnya. Anggaran yang tersedia di Dinas PU hanya Rp9 miliar, sementara untuk memperbaiki jalan yang rusak, butuh Rp400 miliar tiap tahun.

Saat ini, sambungnya, Dinas PU melakukan tambal-sulam ruas jalan yang mengalami kerusakan atau berlubang, seperti yang dilakukan di Limau Manis, Lubuk Buaya, dan Lubuk Kilangan. “Mudah-mudahan anggaran yang kami usulkan untuk jangka panjang disetujui dewan,” kata Herman Peri berharap.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Padang, Zulherman, menyebutkan, Kota Padang butuh penambahan ruas jalan. “Sudah banyak pengaduan. Mudah-mudahan anggarannya naik pada 2014,” ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan, Raju Minpora Chaniago, mengatakan, karena tidak ada penambahan ruas jalan baru, mereka berusaha mengatasi kemacetan dengan menambah jalan satu arah dan bus massal. Jalan satu arah yang telah diusulkan adalah Jalan Perintis Kemerdekaan, Jati, hingga Jalan Gajah Mada, Gunung Pangilun. “Kami sedang bahas kemungkinannya,” ujarnya. Jalan satu arah yang telah dibuat antara lain dari Jalan Damar-Jalan Veteran-Jalan Juanda.

Dinas Perhubungan juga sedang mengerjakan halte untuk bus massal. Tapi, Raju tak dapat menyebutkan secara pasti kapan operasional bus massal dilakukan. Semula direncanakan dioperasikan pada Oktober 2013.

Fidel Miro mengatakan bus massal dapat menjadi solusi

sementara menyelesaikan persoalan kemacetan karena mengurangi angkutan umum yang kecil-kecil. Tapi, tanpa membuat aturan tentang pembatasan jumlah kendaraan, bus massal tak akan dapat menjadi solusi jangka panjang.



**GUSTI AYU GAYATRI** lahir di Padang tanggal 21 Agustus 1982. Perempuan 31 tahun ini mengambil pendidikan terakhir sebagai Sarjana Ekonomi di Universitas Andalas Padang.

Ayu juga aktif dalam berorganisasi, ia menjadi salah satu pendiri Jaringan Jurnalis Siaga Bencana (JJSB), serta aktif menjadi anggota dalam Wartawan Rumah Begonjong (WRB) Sumbar. Sekarang bekerja menjadi jurnalis di Harian Pagi Padang Ekspres (Jawa Pos Group) dari tahun 2008. Sebelumnya pernah bekerja di Harian Sijori Mandiri / Haluan Kepri dari tahun 2004

sampai 2006.

Selama menjadi jurnalis, Ayu telah mendapatkan dua penghargaan dari karya jurnalistiknya. Pertama, menjadi juara I Lomba Penulisan Feature Kota Padang pada tahun 2012. Yang kedua, menjadi salah satu penulis karya jurnalistik terbaik tentang transparansi anggaran 2013.



# TINGGI KUANTITAS, MINIM KUALITAS

## EVALUASI PEMBUATAN RANPERDA KOTA PADANG (I)

**H**ampir setiap tahun anggaran pembahasan rancangan peraturan daerah (ranperda) digelontorkan. Nilainya miliaran rupiah setiap tahun. Namun, besarnya anggaran yang diplot, tak sebanding dengan perda yang dihasilkan. Apakah pembuatan ranperda hanya sekadar mengejar prestasi atau proyek semata?

Uang miliaran rupiah untuk pembuatan perda, sering terbuang percuma karena tak sesuai kebutuhan masyarakat. Akibatnya, perda nyaris tak bertaring dalam penerapannya.

Pada tahun 2009, Pemko dan DPRD Padang mengalokasikan dana untuk pembuatan ranperda Rp2,861 miliar. Sedikitnya ada 13 peraturan daerah (perda) disahkan. Yakni, Perda No 1/2009 tentang APBD 2009, Perda No 2/2009 tentang Pengelolaan dan Retribusi Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah, Perda No 3/2009 tentang Pencabutan Perda No 5/2004 tentang Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Kemudian, Perda No 4/2009 tentang Pencabutan Perda Pajak Pengambilan Sarang Burung Walet, Perda No 5/2009 tentang Perubahan Ketiga Perda No 3/2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, Perda No 6/2009 tentang Perubahan Kedua atas Perda No 10/2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Selain itu, Perda No 7/2009 tentang Perubahan Perda No 5/2005 tentang Pengelolaan Distribusi Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet, Perda No 8/2009 tentang Perubahan Perda No 6/2004 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Juga ada Perda No 9/2009 tentang RPJM Padang tahun 2009-2014, Perda No 10/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perda No 11/2009 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal dan Perda No 12/2009 tentang Perubahan APBD 2009 dan Perda No 13/2009 tentang Pertanggungjawaban APBD 2008.

Jika dilihat dari jumlah perda dihasilkan, hampir semuanya tentang pajak dan retribusi daerah serta perda wajib sebagaimana diamanahkan UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah.

Sementara itu, pada tahun 2010, Sekretariat DPRD Padang telah mengalokasikan anggaran Rp1,9 miliar. Pada kurun waktu satu tahun itu, hanya empat perda disahkan. Tiga ranperda itu, Perda No 1/2010 tentang APBD 2010, Perda No 5/2010 tentang Perubahan APBD 2010, Perda No 2/2010 tentang Pengelolaan Zakat, Perda No 3/2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Jika dilihat dari perda yang dihasilkan, masih berkaitan urusan wajib pemerintah daerah. Perda Pengelolaan Zakat lahir guna memaksimalkan seluruh potensi zakat di Padang. Begitu juga Perda Penyelenggaraan Administrasi Penduduk. Selain amanah UU dalam perda tersebut memuat pengenaan sanksi terhadap masyarakat dalam penyelenggaraan kependudukan serta juga memuat pemberian sanksi terhadap pejabat negara yang memperlambat proses pengurusan administrasi kependudukan.

Meski perda ini disahkan, nyaris tak bertaring ketika pelanggaran tersebut dilakukan pejabat negara dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Sebab, masih banyak masyarakat mengeluhkan lambannya pengurusan hal itu.

Di tahun 2011, Sekretariat DPRD juga mengalokasikan anggaran Rp2,5 miliar dan telah menghasilkan 19 perda. Rincian Perda No 1/2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Perda No 2/2011 tentang Pajak Air Tanah, Perda No 3/2011 tentang Pajak Restoran, Perda No 4/2011 tentang Pajak Hiburan, Perda No 5/2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Kemudian, Perda No 6/2011 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemko pada PDAM Padang, Perda No 7/2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Perda No 8/2011 tentang Pajak Daerah, Perda No 9/2011 tentang Penyertaan Modal Pemko pada PT Balairung Citrajaya Sumbar, Perda No 10/2011 tentang Perubahan atas Perda No 9/2009 tentang RPJM Padang Tahun 2009-2014.

Perda No 11/2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda No 12/2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Perda No 13/2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Perda No 14/2011 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa, Perda No 16/2011 tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2010, Perda No 18/2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemda dan Perda No 19/2011 tentang APBD 2012.

Jika dilihat dari perda dihasilkan, masih seperti tahun sebelumnya berfokus pada kewajiban pemerintah daerah. Sepuluh dari sebelas perda membahas soal peningkatan pendapatan daerah dan hanya satu perda bermanfaat untuk

kepentingan masyarakat.

Pada tahun 2012, Pemko dan DPRD menghasilkan 23 Perda. Rincian, Perda No 1/ 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan pedagang asongan, Perda No 2/ 2012 tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak, Perda No 3/ 2012 tentang Penanaman Modal, Perda No 4/ 2012 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Perda No 6/2012 tentang Tambahan Penyertaan Pemko pada Bank Nagari, Perda No 7/2012 tentang Perubahan atas Perda No 8 tentang Pajak Daerah, Perda No 8/2012 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Berakohol, Perda No 9/2012 tentang Tera Ulang, Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbangan dan Perlengkapan, Perda No 10/2012 tentang Pertanggung Jawaban APBD 2012, Perda No 11/2012 tentang Perbuahan APBD 2012, Perda No 12/2012 tentang Perubahan Atas Perda No 11/2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Selain itu, Perda No 13/2012 tentang Perubahan atas Perda No 15/2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Perda No 14/2012 tentang Perubahan atas Perda No 16/2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Perda No 15/2012 tentang perubahan atas Perda No 17/2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Perda No 16/2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP, Perda No 17/2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, Perda No 18/2012 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Adat Budaya dalam Hidup

Bernagari di Kota Padang.

Selanjutnya, Perda No 19/2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Perda No 20/2012 tentang Pemberdayaan UMKM, Perda No 21/2012 tentang Pengelolaan Sampah, Perda No 22/2012 tentang Percepatan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, Perda No 23/2012 tentang Pengelolaan Rumah Kos, Losmen, Home stay dan sejenisnya.

Tak jauh berbeda, perda yang dihasilkan pemerintah daerah masih berkuat akan perda pajak dan retribusi daerah. Jika pun, ada perda yang dibuat untuk kepentingan masyarakat, tapi tak perlu harus dibuat dalam bentuk Perda namun cukup dengan keputusan kepala daerah.

Misalnya Perda Pemberdayaan dan Pelestarian Adat Budaya dalam Hidup Bernagari di Kota Padang. Dalam struktur pemerintahan di Kota Padang, tak ada istilah nagari namun hanya kelurahan.

Demikian pula Perda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Padahal dalam UU No 40/2007 tentang Lingkungan telah mewajibkan BUMN/ BUMD untuk melaksanakan program kemitraan dan bina lingkungan.

Belum lagi pada tahun 2013 untuk pembuatan Perda digelontorkan anggaran Rp1,4 miliar. Dalam rentan waktu 10 bulan telah dihasilkan 5 Perda. Yakni Perda No 1/2013 tentang APBD 2013, Perda No 2/2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Perda No 3/2013 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral. Perda No 4/2013 tentang Lalu Lintas dan Perda No 5/2013 tentang Tambahan Penyertaan Modal.

# PERDA MANDUL, RATUSAN JUTA TERBUANG

## EVALUASI PEMBUATAN RANPERDA KOTA PADANG (2/HABIS)

Setiap tahun, Pemko Padang melahirkan peraturan daerah. Regulasi yang seyogianya dapat menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat, ternyata mandul. Alhasil, perda yang dibuat dengan uang rakyat hingga ratusan juta itu mubazir.

Sebut saja Perda No 11/2005 tentang Ketertiban Umum. Perda ini dengan tegas melarang pemakaian jalan/ trotoar untuk kepentingan pribadi atau kelompok, menghambat kelancaran lalu lintas serta menumpuk bahan atau benda lain di jalan/ trotoar.

Pengemudi maupun angkutan kota dilarang menggunakan *sound system* mengeluarkan bunyi keras, kaca film dan sirene. Lalu larangan memasang, menempelkan dan menggantungkan benda apa pun pada sarana dan pohon pelindung di jalur hijau atau taman kota dan tempat umum, kecuali izin wali kota atau pejabat berwenang.

Namun praktiknya, penegakan Perda Tibum itu loyo. Tindakan terhadap pelanggaran aturan hangat-hangat tahi ayam. DPRD yang sedianya mengontrol kinerja Pemko, juga impoten.

Menurut sumber Padang Ekspres di DPRD Padang, pembuatan satu perda menghabiskan anggaran Rp260

juta. Anggaran itu termasuk untuk pembuatan naskah akademis, kunjungan anggota DPRD serta kegiatan rapat dan pembayaran honor narasumber untuk konsultasi.

Ketika dikonfirmasi pada Ketua Badan Legislasi DPRD Padang, Jhon Roza Syaukani, malah mengaku tak tahu persis anggaran pembuatan perda. "Saya tak tahu persis, namun nilai satu perda dengan perda lainnya tergantung lama pembahasannya. Kalau waktu pembahasannya lama, biayanya juga tinggi. Tak ada patokan tertentu dalam pembuatan ranperda," tuturnya.

Untuk pembuatan ranperda inisiatif, naskah akademis dan drafnya disiapkan eksekutif. "Untuk pembuatan naskah akademis dan draf tidak ditangani DPRD, tapi menggunakan jasa konsultan. MoU-nya dilakukan antara sekretariat DPRD dengan pihak ketiga," ujar politisi Demokrat ini.

Ketua DPRD Padang, Zulherman menuturkan, pembahasan ranperda sesuai program legislasi daerah (prolegda) yang disepakati antara eksekutif dan legislatif sebelum tahun anggaran. Dia menepis anggapan publik bahwa pembuatan ranperda terkesan diproyekkan.

Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Padang, Andri Yulika, juga mengklaim setiap pembuatan perda sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam pengusulan dan pembahasan berdasarkan keputusan bersama antara DPRD dan Pemko. "Kami tak ujuk-ujuk saja membuat perda," ujarnya.

Di tempat terpisah, Direktur Jemari Sakato, Syafrimet, menilai pembuatan ranperda belum seluruhnya disesuaikan kebutuhan masyarakat. "Apa payung hukumnya, apakah mendesak kebutuhannya, apakah hanya keputusan kepala daerah saja?" ujarnya.

Dia mengaku sering bingung memahami substansi per-

da yang disahkan karena minim sosialisasi. Ujung-ujungnya, perda tersebut sulit direalisasikan. “Terus terang banyak perda disahkan tanpa sosialisasi. Kalau Perda Pajak dan Retribusi Daerah, ada balihonya. Tapi kalau perda yang bersentuhan dengan masyarakat, sosialisasinya tidak kelihatan,” ujarnya.

Dalam pembuatan perda, anggota DPRD menerima uang honor. Ada kesan pembuatan ranperda hanya mengejar proyek semata. “Tak perlu banyak, yang terpenting berkualitas,” ujarnya.

Pengamat Kebijakan Publik, Andrinof Chaniago menuturkan, ranperda tidak melulu menyangkut pajak dan retribusi. “Seharusnya ranperda yang bersentuhan masyarakat diperbanyak. Ini menunjukkan kurangnya kepedulian pemerintah terhadap masyarakat,” ungkapnya.

Kepala Bidang Perundang-Undangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumbar, Desmaniar menilai masih ada aturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan inkonsistensi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.

“Aturan perundang-undangan khususnya perda, idealnya harus satu sistem yang futuristik, berlaku lama dan dapat meminimalisasi persoalan yang mungkin muncul di masa datang. Selain itu, juga mesti aplikatif, tidak multitafsir, sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak tumpang tindih,” ujarnya.







**MUHAMMAD ULUL HADIYIN** yang biasa dipanggil Hadi ini asli putra Kediri Jawa Timur, lahir pada 19 Maret 1980 sebagai anak sulung dari pasangan Mahfud dan Musrifah. Jenjang Pendidikan semuanya ditempuh di Kota Kediri mulai dari SD hingga kuliah. Lulusan STAIN Kediri tahun 2004 ini juga sempat mengenyam pendidikan di pesantren salaf selama 6 tahun. Kegemaran menulis dijalaninya ketika bergabung di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kediri. Sampai akhirnya setelah lulus kuliah memutuskan bergabung di Radio Andika FM sebagai reporter hingga dipercaya sebagai penanggungjawab bidang pemberitaan sampai sekarang. Selama menjalani

profesi sebagai reporter, aktif mengikuti berbagai pelatihan jurnalistik baik di daerah dan di luar daerah. Termasuk mendapatkan berbagai penghargaan dalam lomba penulisan tingkat lokal maupun regional. Menikah dengan Lutfiana seorang pendidik di kampung halamannya dan kini sudah dikaruniai 2 orang putri, Maulida Zahwa usia 7 tahun dan Arina Yunaida usia 1 tahun.

# DANA BSM SUDAH DI TANGANTAPI MELAYANG

*Pemerintah berupaya membantu kelancaran proses belajar siswa dari keluarga miskin. Salah satunya melalui program pemberian dana Bantuan Siswa Miskin (BSM). Dana bantuan ini untuk pemenuhan kebutuhan pribadi siswa guna mendukung kegiatan belajarnya.*

*Tetapi sayangnya di Kota Kediri, dana BSM untuk periode tahun ajaran 2012/2013 belum bisa dinikmati siswa dari keluarga miskin karena harus disetor ke sekolah. Parahnya, pemanfaatan dana BSM oleh sekolah menyalahi petunjuk teknis dan tidak jelas penggunaannya. Berikut liputan selengkapnya.*

**P**emerintah Kota Kediri pada tahun ajaran 2012/2013 mendapat jatah program dari pemerintah pusat berupa Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk siswa tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Program ini adalah bantuan uang tunai yang diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu guna mendukung kegiatan belajar di sekolah. Untuk tingkat SMP, semua sekolah di kota Kediri baik negeri maupun swasta yang berjumlah 30 lembaga mendapat jatah program ini. Rinciannya, 8 SMP Negeri dan 22 SMP Swasta.

Alokasi dana BSM masing masing sekolah berbeda, sesuai jumlah siswa miskin. Sedangkan acuan siswa miskin penerima BSM adalah siswa dari keluarga miskin yang memegang

Kartu Perlindungan Sosial. Sesuai data dari PT Pos Kediri, dari 30 lembaga sekolah tingkat SMP, tercatat 5.437 siswa mendapat bantuan dana BSM ini. Per siswa menerima Rp550 ribu dengan total dana yang dikucurkan dua miliar 897 juta 400 ribu rupiah. Teknis penyaluran dana langsung pada siswa, bergiliran diambil di PT Pos Kediri sesuai jadwal yang sudah ditentukan sejak awal 2013.

Tetapi dalam realisasi penerimaan dana BSM, mayoritas pengelola sekolah meminta siswa menyerahkan dana yang sudah diterima. Bahkan sejumlah guru ikut mendampingi para siswa saat pengambilan dana BSM di Kantor pos. Di lokasi pengambilan dana BSM, siswa kemudian langsung diminta menyetor uang tunai yang sudah mereka ambil. SA, siswi SMP Negeri 1 Kota Kediri, mengaku begitu mengambil uang BSM yang menjadi haknya langsung diminta gurunya. Sesuai informasi yang diterimanya dana itu digunakan untuk keperluan membeli seragam dan biaya bimbingan belajar.

*“kan sekolah kan apa namane kayak ada perlu kayak buat apa namane kayak seragam hoooh acara acara kayak gitu, itu kan pake uang itu jadi gak suruh bayar lagi pakai uang itu, misalnya kayak bimbel ya pakai uang itu,”*

Sementara itu Yayuk Cahyaningsih, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kediri, mengakui dana BSM yang diterima siswa memang disetor ke sekolah. Tetapi dia menegaskan dana itu akan kembali untuk kebutuhan siswa seperti untuk biaya bimbingan belajar, kegiatan ulang tahun sekolah, peringatan hari besar nasional maupun hari besar agama. Kemudian juga untuk membeli buku materi pelajaran dan biaya asuransi kesehatan siswa yang bersangkutan. Yayuk juga mengklaim penggunaan dana BSM sudah disetujui komite sekolah.

*“dan itupun saya tidak, komitepun juga tahu kebutuhan terus*

*program sekolah tiap tahun juga ada dan itupun sudah disetujui oleh komite, jadi bukan berarti sekolah mlaku sak karepe dewe ndak (berjalan sesuai keinginan sendiri),”*

Pengelola SMP Negeri 8 Kota Kediri juga melakukan yang sama. Dana BSM yang diambil siswa di PT Pos langsung disetor ke guru. Begitu siswa mengambil uang tunai di loket, gurunya sudah menunggu di pintu keluar untuk menerima setoran uang tersebut. Namun secara rinci untuk apa saja dana itu, pihak sekolah belum bisa menjelaskan. Mereka tak menjelaskan berapa biaya untuk kebutuhan *study tour* siswa pada Januari 2014 mendatang yang juga diambilkan dari dana BSM.

Sementara dana BSM senilai Rp216 juta 700 ribu yang menjadi hak siswa miskin di SMP Negeri 8 masih disimpan di bank. Pihak sekolah menegaskan dana itu berikutan bunga banknya akan kembali untuk kebutuhan siswa. Tetapi pihak sekolah tidak bisa memastikan kapan laporan rincian penggunaan dana tersebut diberikan ke siswa. Budiman Jales Riono, Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 8 bidang Kesiswaan menuturkan, dana BSM SMP Negeri 8 digunakan untuk kebutuhan siswa yang bersangkutan dan dana dikoordinasi sekolah.

*“Dikoordinasi sekolah nanti digunakan untuk keperluan anak, karena penggunaannya kan belum waktunya. Begitu maksudnya.”*

Ternyata kebijakan sekolah mengkoordinir penggunaan dana BSM tidak disampaikan pada wali siswa. Bahkan wali siswa mengaku heran siswa penerima BSM langsung diminta menyeter uang tunai yang diambil di Kantor Pos saat itu juga ke guru. Ini sangat janggal apalagi sebelumnya tidak ada sosialisasi sama sekali.

Erna, wali siswa SMP Negeri 8 menuturkan, kalau BSM

adalah hak siswa miskin seharusnya penggunaannya tidak dikoordinir sekolah. Menurutnya, apa saja kebutuhan belajar siswa, yang mengetahui adalah siswa itu sendiri. Dia menegaskan hingga awal September 2013 ini tidak ada penjelasan sama sekali dari sekolah terkait program BSM.

*“Tidak. Tidak ada sama sekali (penjelasan). Tidak ada komunikasi sama sekali dengan wali murid sampai sekarang tidak ada. Sebelum dapat, sesudah dapat, itu tidak ada informasi ke wali murid sampai sekarang,”*

Sementara itu kebijakan penggunaan dana BSM yang diambil pengelola SMP di Kota Kediri dipastikan menyalahi prosedur. Sebab penggunaan dana BSM sepenuhnya hak siswa yang bersangkutan. Sesuai petunjuk teknis penggunaan dana BSM, pemanfaatan dana ini adalah untuk pembiayaan keperluan pribadi siswa dalam rangka penyelesaian pendidikan masing masing siswa di antaranya untuk pembelian buku, bahan, alat tulis dan sejenisnya. Kemudian juga bisa untuk pembelian seragam sekolah, tas sekolah dan sejenisnya serta untuk biaya transportasi pulang pergi ke sekolah.

Agus Dwi, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Kediri, menuturkan, agar tepat sasaran pemanfaatan dana BSM harus sesuai dengan petunjuk teknis. Dana BSM diterima dan dimanfaatkan langsung untuk keperluan pribadi siswa.

*“Pemanfaatan ini tentunya diserahkan sepenuhnya pada siswa karena pendanaan ini adalah oleh siswa untuk pembiayaan keperluan pribadi siswa dalam rangka penyelesaian pendidikan pada jenjang yang dilakukan oleh siswa tersebut,”*

Pemanfaatan dana BSM untuk keperluan pribadi siswa ditegaskan pula kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Gunawan Setiobudi. Menurutnya, dana BSM harus diserahkan

pada siswa untuk keperluan pribadinya sesuai petunjuk teknis yang ada. Penggunaan dana di luar kebutuhan yang sudah ditetapkan jelas dilarang. Untuk itu Gunawan mengharuskan semua sekolah menjalankan program pendidikan sesuai aturan, terutama yang menggunakan dana pemerintah.

*“Jadi kita jangan melaksanakan kegiatan kegiatan yang ada hubungannya dengan uang itu menyimpang dari petunjuk yang ada. Kegiatan yang ada hubungannya dengan uang tolong disesuaikan dengan petunjuk yang ada,”*

Pelaksanaan program BSM untuk siswa tingkat SMP di Kota Kediri sangat janggal dan jelas menyalahi petunjuk teknis. Selain tidak ada sosialisasi dana BSM siswa miskin ini oleh sekolah disimpan di bank, penggunaannya pun tidak diserahkan langsung ke masing-masing siswa penerima. Laporan rincian penggunaan dana yang menjadi hak siswa miskin tersebut juga tidak jelas. Inilah yang patut diperhatikan wali siswa dari keluarga miskin. Wali siswa harus mengawal realisasi penggunaan dana BSM agar benar benar sesuai petunjuk teknis sehingga bisa dirasakan dan dinikmati siswa penerima.



**ADHAR MUTTAQIN.** Dimas, begitulah orang biasa menyapanya. Pria yang bernama asli Adhar Muttaqin ini lahir di Blitar, Jawa Timur 4 April 1984 silam. Putra kelima dari pasangan Abdul Hadi dan Muslikah ini menghabiskan masa pendidikan SD hingga MTs di wilayah Kecamatan Selopuro. Selanjutnya ia mengambil studi di jurusan teknik listrik di SMK Negeri 1 Blitar. Kecintaannya terhadap dunia jurnalistik dimulai sejak berada di sekolah kejuruan tersebut dengan aktif mengikuti ekstrakurikuler jurnalistik.

Lulus SMK tahun 2003, ia langsung memilih untuk terjun ke dunia kerja dengan bergabung menjadi salah satu teknisi kelistrikan mobil di Blitar. Namun kecintaannya terhadap dunia jurnalistik dan "broadcasting" membuat lelaki berbintang Aries ini untuk merubah haluan dengan menjadi penyiar Radio ADSFM Trenggalek.

Sejak tahun 2004 hingga tahun 2009, Dimas fokus untuk menekuni dunia penyiaran. Pada tahun 2009 ia mendapatkan tambahan tugas baru menjadi penyiar sekaligus reporter di radio tersebut.

Memasuki tahun 2011, pria asli Blitar ini mempersunting salah satu gadis Trenggalek, Nurma Widayati. Dari pernikahannya tersebut ia dikaruniai seorang buah hati yang diberi nama Kalila Maharani.

Tahun 2012, Dimas memilih untuk keluar dari Radio ADSFM dan bergabung menjadi kontributor Kantor Berita Radio KBR68H wilayah Trenggalek, Tulungagung dan Blitar. Selain itu ia juga mengasah ilmu menulisnya dengan bergabung menjadi 'stringer' salah satu media online nasional.



# IRONI GURU SERTIFIKASI

*Sejak 2006 lalu, pemerintah pusat menggulirkan program sertifikasi guru. Para guru bersertifikasi berhak mendapat tunjangan profesi pendidik sebesar satu kali gaji. Di Trenggalek, Jawa Timur, pemerintah daerah mendapat alokasi anggaran hampir 200 miliar rupiah untuk tunjangan sertifikasi. Namun tunjangan sertifikasi ini dianggap tidak mempengaruhi kualitas pendidikan di Trenggalek. Apa masalahnya? Kontributor KBR68H menyusun laporan berikut.*

**D**i sebuah rumah di Kabupaten Trenggalek, seorang guru bernama Ari duduk santai menikmati pagi. Hari itu sebetulnya hari kerja, namun Ari yang bertugas di kawasan pegunungan di Trenggalek tidak mengajar hari itu. Dalam sepekan, ia hanya mengajar empat hari saja.

*“Kalau di pegunungan itu kerjanya itu dipadatkan, jadi misalkan seharusnya satu minggu akhirnya dipadatkan menjadi empat hari, seperti itu. Terus lagi, ya itu tadi kebanyakan juga guru-guru di pegunungan itu kebanyakan berasal dari dataran (rendah), Seharusnya enam hari menjadi empat hari.”*

Aturan pemerintah pusat mewajibkan guru bersertifikasi mengajar 24 jam sepekan. Ini memaksa guru berjumpalitan memenuhi kewajiban tersebut dengan mengajar di sekolah lain. Minimnya transportasi dan sulitnya medan di kawasan

pegunungan membuat para guru di sana pun mengakali aturan itu dengan memadatkan jam belajar.

Jika jam belajar tidak terpenuhi maka tunjangan bisa dihentikan. Agar tidak ketahuan pengawas dinas pendidikan, biasanya para guru memadatkan jam kerja dengan cara saling tukar dengan guru yang lain. Sedangkan jadwal mengajar yang ditetapkan sekolah tidak mengalami perubahan.

Perilaku ini juga dibenarkan Muanas, seorang guru yang belum bersertifikasi di Kecamatan Dongko, Trenggalek. Muanas mengatakan sudah lumrah guru bersertifikasi yang ditugaskan ke kawasan pegunungan terlambat datang mengajar di sekolah.

Program sertifikasi guru membawa dampak pada nasib guru swasta dan nonsertifikasi seperti Anas. Ia terpaksa merelakan beberapa jam mengajarnya karena diminta guru sertifikasi yang kekurangan jam. Gaji yang biasanya diterima sekitar Rp350 ribu per bulan pun berkurang karena jam mengajarnya berkurang.

***Muanas:** Akhirnya, ya kita tetap mengalah, mau tidak mau. Mungkin kebijakan dari orang sertifikasi itu ada sedikit tanda terima kasih dari beliau-beliau.*

***KBR68H:** Ada yang mengasih semacam uang pengganti?*

***Muanas:** Ya, bahasanya tanda terimakasihlah ke sekolahan maksudnya.*

***KBR68H:** O, ke sekolahan, tidak ke guru ya?*

***Muanas:** Tidak.*

Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek, Surjono, menyatakan

beratnya kondisi medan di daerah pegunungan dijadikan alasan para guru malas mengajar. Namun Surjono menegaskan, para guru tidak dibenarkan memadatkan jam mengajar menjadi empat hari dalam seminggu.

**Surjono:** *Ya harus full, sesuai aturan kan harus full enam hari.*

**KBR68H:** *Kemudian kalau terkait mereka memadatkan untuk mengajar?*

**Surjono:** *Ya, tidak boleh, makanya mindset tadi lo ya, ada lagi dengan adanya perpup yang baru, dengan perpup ini mereka otomatis mereka harus full. Yang enam hari ya Senin jam 7.00 sampai 14.00, harus mengikuti ini (dan) Jumat jam 7.00 sampai jam 11.00 dan Sabtu jam 7.00 sampai dengan jam setengah satu, 12.30. Itu berdasarkan perpup nomor 102 tahun 2012 tentang ketentuan hari dan jam kerja satuan kerja perangkat daerah, di antaranya lembaga pendidikan.*

“Perpup” adalah singkatan dari “peraturan bupati”.

Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek mengakui selama delapan tahun program sertifikasi guru berjalan, belum ada peningkatan mutu pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek Kusprigiantoro mengatakan nyaris tidak ada peningkatan mutu pembelajaran maupun etos kerja dari para guru bersertifikasi.

*“Dan masih kita temukan beberapa guru yang sudah mendapatkan TPP (tunjangan profesi pendidik) itu kinerjanya masih tetap stagnan. Masih ada yang sering meninggalkan jam tugas, karena kami sendiri setiap Sabtu keliling di masing-masing kecamatan, ternyata masih ada di setiap SD itu ada yang tidak masuk dengan*

*berbagai macam alasan."*

Jika gaji seorang guru bersertifikasi Rp3 juta rupiah, maka ia akan mendapatkan tambahan tunjangan profesi senilai gaji itu sehingga bisa mendapat Rp6 juta rupiah. Di Trenggalek, anggaran untuk tunjangan guru bersertifikasi mencapai Rp200 miliar per tahun.

Pengamat pendidikan dari Quantum Litera Center (QLC) Trenggalek, Nurani Soyomukti, menilai guru bersertifikasi yang memiliki semangat meningkatkan mutu pendidikan sangat sedikit. Jumlahnya diperkirakan hanya 10 persen, itu pun hanya didominasi oleh guru-guru muda.

*"Karena guru-guru itu terbiasa untuk mengejar setoran saja, artinya kegiatan ini hanyalah formalitas, guru-guru juga hanya memenuhi secara formalitas,"*

Nurani Soyomukti mengusulkan agar kepala dinas pendidikan lebih selektif mengusulkan nama-nama guru yang akan diikuti program sertifikasi. Hal itu untuk mencegah agar anggaran tunjangan profesi pendidik tidak terbuang sia-sia.

Program guru bersertifikasi juga belum dirasakan seluruh siswa. Salah satu wali murid di Trenggalek, Ety Vidarini, mengatakan, ia terpaksa memasukkan anaknya ke lembaga bimbingan belajar untuk meningkatkan kemampuan belajar anaknya.

*Ety Vidarini: kalau perubahan mungkin di kelas lima ya, tapi itu ditunjang dengan les-les di luar, bukan dari sekolah saja.*

**KBR68H:** *Kalau yang dari sekolah?*

**Ety Vidarini:** *Masih belum mumpuni, masih banyak yang dari les-les di luar itu, di luar sekolah.*

Ety berharap, guru penerima tunjangan sertifikasi bertanggung jawab terhadap predikat yang telah disandang. Ia juga mendesak pemerintah membuat aturan dan mengawasi ketat pelaksanaan guru bersertifikasi, agar kualitas pendidikan masing-masing guru terus meningkat.



**GATOT ARIFIANTO** bergiat di LKBN Antara Biro Lampung dan tercatat sebagai wartawan muda di Dewan Pers dengan nomor Id 3464. Aktif juga di GP Ansor Waykanan sebagai Wakasatkorcab Banser dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagai anggota Majelis Pembina Cabang. Selain hobi membuat film dokumenter, Sekretaris Panti Asuhan Mandiri Yayasan Shuffah Blambangan Umpu ini juga menulis puisi, cerpen dan esai di surat kabar lokal dan nasional. Karya jurnalistiknya ikut dibukukan dalam “Merajut Jurnalisme Damai di Lampung” terbitan AJI Bandar Lampung dan

Indepth Publishing.

Gatot Arifianto, bergiat di LKBN Antara Biro Lampung dan tercatat sebagai wartawan muda di Dewan Pers dengan nomor Id 3464. Ayah dari Haura Zanna Netrahyahimsa dan Sayyidina Tsaqif Netrahyahimsa tersebut juga aktif di GP Ansor Waykanan sebagai Wakasatkorcab Banser dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagai anggota Majelis Pembina Cabang. Selain hobi membuat film dokumenter, Sekretaris Panti Asuhan Mandiri Yayasan Shuffah Blambangan Umpu ini juga menulis puisi, cerpen dan esai di beberapa surat kabar lokal dan nasional. Karya jurnalistiknya ikut dibukukan dalam “Merajut Jurnalisme Damai di Lampung” terbitan AJI Bandar Lampung dan Indepth Publishing.

Twitter @sineasastra e-mail gatotarifianto@gmail.com BB 29F61C7B

# ANGGARAN DAN PROBLEMATIKA PENDIDIKAN KABUPATEN WAYKANAN

**K**etukan palu Ketua DPRD Marsidi Hasan pada Senin siang, 26 November 2012, mengesahkan APBD 2013 Kabupaten Waykanan Lampung berjumlah Rp849 miliar, dengan 38,79 persen dari nominal tersebut dialokasikan bagi sektor pendidikan.

Pada era Orde Baru, ujar Wakil Ketua DPRD Waykanan Yozi Rizal, di Blambangan Umpu, 220 kilometer sebelah utara Kota Bandarlampung, Minggu (29/9), institusi pekerjaan umum yang “seksi” atau menjadi perhatian dan mendapatkan prioritas penganggaran yang paling besar. Tapi pada era Reformasi sekarang ini, yang seksi dan menjadi primadona adalah institusi pendidikan karena memiliki anggaran lebih besar.

“Alokasi untuk Dinas Pendidikan Rp66 miliar, yang digunakan untuk belanja langsung Rp61 miliar dan belanja tidak langsung Rp5 miliar,” kata Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Waykanan Edward Anthony.

Anggaran pendidikan sebesar itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI I 2008 bahwa pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Blambanganumpu Kabupaten Waykanan Neneng Rahmadini sepakat dengan kebijakan itu, mengingat dasar perubahan suatu daerah ke depan tergantung dari kemajuan sektor pendidikan. Seperti halnya Yozi, Neneng juga menyatakan bahwa anggaran untuk institusi pendidikan dari atas ke bawah sekarang ini tergolong “seksi”.

Namun Yozi Rizal mengingatkan penggunaan anggaran oleh institusi pendidikan yang harus diawasi intens untuk mencapai pembangunan edukasi seperti diharapkan. Ada sejumlah kenyataan di beberapa wilayah di Indonesia, sejumlah oknum justru berebut “bancakan” untuk memainkan anggaran pendidikan dan menafikan hakikat pendidikan yang sesungguhnya.

## **MEMBANGUN DENGAN PENDIDIKAN**

Kabupaten Waykanan dengan ibu kota Blambanganumpu merupakan daerah pemekaran Kabupaten Lampung Utara tahun 1999, dan masih termasuk satu dari 183 kabupaten/ kota tertinggal di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) setempat tahun 2011, penduduk daerah ini berjumlah 406.735 jiwa, 36.034 KK tercatat sebagai warga miskin.

Pemerintah Kabupaten Waykanan Provinsi Lampung periode 2010–2015 berupaya memutus rantai kemiskinan dengan pendidikan. Sejumlah langkah ditempuh dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan pendidikan, seperti menetapkan Rabu sebagai Hari Pendidikan Bangkit.

Selain itu, ada pula Program Wajib Belajar 12 Tahun dengan gerakan pendidikan gratis melalui pemberian Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Rp30 ribu/ per siswa SD negeri/ tahun



dan Rp15 ribu/ per siswa SD swasta/ tahun, serta ada juga beasiswa bagi masyarakat miskin.

Dampak dari kebijakan itu, antara lain Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar (SD) sederajat tahun 2010 yang tercatat 96,27 persen, meningkat dari 97,50 persen pada tahun 2011. Lantas pada tahun 2012 meningkat lagi mencapai 97,80 persen.

“Tahun 2013 kami menargetkan terjadi peningkatan APM lagi, mencapai 98,20 persen,” kata Bupati Waykanan Bustami Zainudin didampingi Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat, Anang Risgiyanto.

APM untuk sekolah menengah pertama (SMP) sederajat tahun 2010, kata Bustami, yang mulai memimpin daerah itu sejak 23 Agustus 2010 didampingi Wakil Bupati Raden Nasution Husin, tercatat sekitar 84,13 persen.

Pada tahun 2011, APM daerah ini naik mencapai 85,20 persen, lantas meningkat lagi mencapai 88,90 persen pada tahun 2012. Pada 2013 ini ditargetkan meningkat mencapai 92,60 persen.

“Untuk APM sekolah menengah atas tahun 2010 pada kisaran 50,14 persen. Pada tahun 2011, naik mencapai 51 persen. Lantas meningkat lagi menjadi 55,17 persen pada tahun 2012, dan ditargetkan akan meningkat mencapai 59,35 persen pada tahun 2013,” ujar Bustami pula.

## **PROBLEMATIKA PENDIDIKAN**

Perubahan dalam kehidupan adalah keniscayaan. Bagi Kabupaten Waykanan yang masih dinyatakan tertinggal dan miskin oleh pemerintah pusat, tentu hal tersebut menjadi pilihan mutlak. Karena itu, perlu peta jalan yang jelas, salah satunya dengan menumbuhkembangkan sumber daya

manusia melalui pendidikan.

Pada tahun 2012, alokasi BOSDA untuk kepentingan pendidikan Rp9,389 miliar. Lalu, tahun 2013, menurut Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Waykanan Edward Anthony Rp8,466 miliar.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Waykanan Khambali menguraikan, setiap siswa SMA negeri mendapatkan Rp960 ribu/ tahun, dan setiap siswa SMA swasta mendapatkan Rp600 ribu/ tahun. Sedangkan pelajar SMK negeri mendapatkan Rp1,320 juta/ tahun dan untuk swasta mendapatkan Rp720 ribu/ siswa/ tahun. Setiap pelajar madrasah aliyah (MA) negeri dan swasta masing-masing juga mendapatkan Rp400 ribu/ tahun.

“Yang saya sampaikan tadi alokasi pada tahun ajaran 2012/2013. Pada tahun ajaran 2013/2014 setiap siswa SMA negeri mendapatkan Rp755 ribu per tahun, lalu setiap siswa SMK negeri mendapatkan Rp1,050 juta. Untuk SMA dan SMK swasta berikut MA belum diputuskan,” kata Khambali lagi.

Kabupaten Waykanan berada di selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur Provinsi Sumatera Selatan. Daerah yang memiliki 222 kampung/ kelurahan di 14 kecamatan tersebut berada di sebelah utara Kabupaten Lampung Utara.

Badan Kepegawaian Daerah setempat pada Agustus 2013 mendata, guru SD berstatus PNS di daerah yang berada di barat Kabupaten Tulangbawang tersebut berjumlah 2.278 orang, guru SMP 650 orang, SMA 303 orang, dan SMK 126 orang.

“Alokasi gaji untuk guru SD Rp108,528 miliar, gaji untuk guru SMP Rp34,255 miliar, dan gaji untuk pengajar SMA atau SMK Rp20,905 miliar. Sedangkan anggaran untuk 14 unit pelaksana teknis pendidikan tahun ini Rp429 juta, naik dari

tahun 2012 yang hanya dialokasikan Rp375 juta,” ujar Edward menjelaskan alokasi anggaran pendidikan di daerah yang berada di timur Kabupaten Lampung Barat tersebut.

Pada Tahun Ajaran 2013/2014, Dinas Pendidikan Kabupaten Waykanan mencatat 50.629 siswa menimba ilmu di 313 SD. Sebanyak 299 SD itu berstatus negeri, dan sisanya berstatus swasta.

Pada 59 SMP negeri dan 20 swasta, tercatat jumlah murid 17.036 jiwa. Lalu dari 34 SMA negeri dan swasta, jumlah siswanya 7.706 jiwa. Selanjutnya dari 20 SMK negeri dan swasta, jumlah muridnya 4.482 jiwa.

Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah pada tahun anggaran 2013, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan untuk SD/ SDLB Rp580ribu/ siswa/ tahun, dan SMP/ SMPLB/ SMPT Rp710 ribu/ siswa/ tahun.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Tahun 2013 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Selain itu, ditegaskan pula secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat atas pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Karena itu, menurut Ketua LSM Forum Masyarakat Bersatu Juanda Ariyanto, pengistilahan pendidikan gratis di Waykanan merupakan sebuah kekeliruan.

“Yang dibicarakan itu sebenarnya subsidi, tapi diembuskan

menjadi sekolah gratis. Hal itu, praktis menimbulkan persoalan, seperti wali murid yang enggan berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan karena sudah ada kata gratis,” kata Juanda yang menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya sebatas di sekolah saja, tapi juga meliputi peningkatan sumber daya manusia, salah satunya melalui kegiatan ekstrakurikuler.

Subsidi pemerintah untuk pendidikan yang lebih sering diimbuskan dengan kata gratis itu ternyata tidak cukup untuk menopang pembiayaan berbagai kegiatan sekolah. Sejumlah sekolah mengurangi kegiatan ekstrakurikuler seperti komputer karena kekurangan anggaran untuk membayar listrik.

Di SMAN 1 Blambanganumpu, pada tahun ajaran 2011/2012, kepala sekolah bertugas melakukan penarikan sepihak dana Rp500 ribu supaya kegiatan sekolah bisa tetap berjalan. “Di Baradatu bahkan ada sekolah yang akhirnya menarik dana per siswa Rp800 ribu. Saya pikir hal semacam itu tidak bagus untuk peningkatan SDM,” kata Juanda yang pernah menjadi pengurus Komite SMAN 1 Blambanganumpu itu lagi.

Persoalan lain di sektor pendidikan juga disampaikan anggota DPRD Waykanan, Joni. Menurut dia, banyak suara miring mengenai pemotongan anggaran oleh pimpinan institusi pendidikan setempat. “Suara-suara dari bawah yang kami dengar adanya setoran untuk pembangunan fisik, mencapai 30 persen. Jika benar terjadi, bisa dibayangkan bagaimana kualitas bangunan tersebut,” katanya.

Rangka baja atap ringan yang tidak sesuai spesifikasinya untuk pembangunan sejumlah sekolah juga digunjingkan. Ketebalan minimal seharusnya 0,75 milimeter, tapi ada yang tebalnya di bawah ketentuan bestek konstruksi tersebut, kisaran 0,50 hingga 0,65 milimeter.

“Bahkan informasinya, *dropping* material tersebut dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan sendiri,” kata Joni pula.

Pemerintah pusat, menurut Kepala Dinas Pendidikan Waykanan Gino Vanollie, menanggapi sejumlah tuduhan itu, merancang bahwa alokasi dana BOS sudah mampu menutup 100 persen biaya operasional. Adapun dengan tambahan BOSDA, tidak boleh membuat intensitas kegiatan sekolah seperti ekstrakurikuler menjadi menurun.

“Dengan wajib belajar 12 tahun, kita menjamin anak-anak harus dilayani dengan baik dan tidak ada alasan untuk tidak sekolah. Dana yang masuk ke sekolah juga relatif sudah memadai bila dikomparatifkan dengan kemampuan orang tua murid seandainya dana tersebut diambilkan dari orang tua murid,” katanya.

Gino menyatakan masyarakat perlu dijelaskan lebih lanjut bahwa sekolah gratis itu bukan gratis begitu saja dan tanpa biaya. “Tetapi pembiayaannya sudah diambil alih oleh pemerintah, dan besarnya, saya yakin boleh dilakukan penelitian atau wawancara atau semacam *interview* di lapangan, apakah dana yang diberikan pemerintah pusat memang itu terlalu kecil atau bagaimana,” kata dia lagi.

Dalam pengembangan percepatan pembangunan sekolah, Gino yang memimpin institusi pendidikan Waykanan mulai 7 November 2011 setelah menjadi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan setempat mulai 25 Agustus 2010 itu, menegaskan partisipasi dari masyarakat juga tetap diperlukan.

“Tidak haram hukumnya masyarakat memberikan bantuan pembangunan di sekolah, seperti musala, WC, sanitasi air yang baik di sekolah, karena memang biaya operasional dari BOS dan BOSDA tidak mampu menutupi pembiayaan

tambahan fasilitas yang diperlukan itu,” katanya lagi.

Institusi pendidikan, ujanya pula, memiliki kewajiban memfasilitasi dan menjadi supervisi terkait dengan pembangunan di tingkat sekolah. “Ini karena tidak semua sekolah juga memahami dan mengerti tentang itu. Apalagi pembangunan harus segera dilaksanakan dan tanggung jawab itu pada akhirnya kembali ke saya,” kata dia lagi.

Dalam hal pengadaan rangka baja atap ringan, Gino menegaskan, Dinas Pendidikan Waykanan berkepentingan merekomendasikan perusahaan-perusahaan yang bonafide dan tidak bermasalah. “Keterlibatan para pihak untuk membantu mensuplai baja pada tahun 2012 harus membuat saya angkat topi dan hormat,” kata Gino pula.

Padahal, saat itu seluruh Indonesia membutuhkan bahan yang sama, sehingga bagaimana sekolah-sekolah itu mendapatkan barang yang diperlukan merupakan hal yang patut diapresiasi. “Saya pikir orang hanya bisa menyalahkan saja. Ketika sampai waktunya pekerjaan belum selesai, akhirnya kami juga yang disalahkan,” ujar dia.

Dinas Pendidikan, demikian Gino menambahkan, memiliki komitmen menjalankan tugas negara sesuai amanat UUD 1945.

“Saya pikir yang kami laksanakan masih sesuai aturan. Selain itu, kami juga berpikir asas manfaatnya. Kalau tahun ini bisa selesai, paling tidak tahun berikutnya sudah bisa dipakai. Selain itu juga, rekanan, semua yang mengerjakan dan *supplier*-nya resmi semua, silakan saja dibuktikan. Seharusnya hal-hal semacam itu diapresiasi karena dinas ada perhatian hingga ke situ. Tapi boleh saya sampaikan, semua tuduhan itu tidak benar,” kata Gino menepis tudingan terhadap dirinya dan Dinas Pendidikan Waykanan selama ini.

## TANTANGAN DAN HARAPAN

Pendidikan adalah kata kunci melancarkan regenerasi suatu bangsa sehingga perlu usaha sadar untuk mewujudkannya. “Se tua mahali, se oki makiit,” demikian aforisma Minahasa, Sulawesi Utara, yang berarti: “Mereka orang tua membawa anak mengikuti.” Sebuah kebijakan yang mengajarkan bahwa orang tua dan pemimpin harus menjadi penuntun anak-anak maupun masyarakatnya. Baik buruk anak dan masyarakat tergantung bagaimana didikan orang tua dan pemimpinnya.

Tantangan pendidikan di Waykanan saat ini adalah bagaimana mencapai tujuan yang diharapkan. “Harus punya *political will* yang tinggi untuk sampai ke tujuan. Tantangan berat lainnya adalah masih ada pihak yang lebih senang kalau banyak sumber daya manusia di Waykanan yang tidak maju-maju, tetap seperti ini,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Blambanganumpu Neneng Rahmadini lagi.

Yozi Rizal menambahkan, semangat orang ketika masuk Dinas Pendidikan itu seharusnya bagaimana cara melayani rakyat dengan proses pendidikan yang baik dan bisa menghasilkan sumber daya manusia yang baik. “Bukan malah berpikiran berapa rezeki yang bisa didapatkan setiap tahun dari sini,” ujarnya pula.

Masih adanya paradigma seperti itu, menurut Yozi, yang membuat cita-cita Ki Hadjar Dewantara “Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani” jauh panggang dari api. Slogan itu artinya, “Dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan, di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide, dan di depan, seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik”.

“Harapan terwujud hal itu masih jauh, karena dikotori oleh

para perusuh pendidikan yang mempunyai hasrat ‘bancakan’ anggaran. Sudahkah sekolah mencetak generasi terdidik berpengetahuan atau masih sekadar mencetak orang-orang yang memiliki legitimasi pendidikan. Karena itu, institusi penegak hukum harus intens memantau lembaga-lembaga pendidikan,” ujar dia pula.

Kejaksaan Negeri Blambanganumpu, menurut Neneng, memang berwenang melakukan pengawalan terhadap APBD Kabupaten Waykanan, termasuk yang dialokasikan untuk Dinas Pendidikan pada tahun 2013. “Tapi karena masih berjalan, kami memantau. Kalau saya pribadi memantaunya bukan dari Dinas Pendidikan secara langsung, tapi tentunya dengan cara sendiri,” kata dia lagi.

Gino mempersilakan pihak-pihak berkompeten ikut memantau penggunaan BOS dan BOSDA. Pengawasan dan audit resmi atas anggaran itu sudah dilakukan oleh pihak-pihak yang diberi wewenang oleh pemerintah seperti Inspektorat.

“Tapi harus tahu juga batas dan proporsinya bahwa yang berhak melakukan audit tentang pengelolaan BOS dan BOSDA ini sudah ada pihak yang sudah diutus pemerintah untuk melakukan itu. Jadi, tinggal bagaimana peran masing-masing bisa berjalan optimal,” kata dia pula.

“Bontor juk tering, rulus juk lapah anak panah,” demikian ungkapan bijak masyarakat Lampung yang berarti: “bulat seperti bambu peniup api, lurus seperti jalannya panah.” Sebuah aforisma yang mengajarkan gambaran sikap mental teguh yang sepatutnya dimiliki demi mencukupi kepentingan positif bersama sebuah lingkungan (komunitas).

Ajaran itu masih relevan untuk dilakukan pada era modern ini agar hasil pendidikan dari anggaran sebesar Rp66,878



miliar bisa optimal seperti halnya tepuk dan riuh kegembiraan di ruang paripurna ketika pengesahan APBD Waykanan 2013.

Ketika pendidikan menjadi jalan lurus dan benar untuk memperbaiki dan memajukan bangsa sebagaimana cita-cita dan harapan pendiri bangsa; menjadi jelas untuk apa, siapa, mengapa dan bagaimana anggaran pendidikan yang sekarang sudah jadi barang yang seksi itu disalurkan, bukan?



**BHEKTI SURYANI** mulai mengenal jurnalistik sejak pertama kali bergabung dengan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Teropong, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) “APMD” Yogyakarta pada 2004. Ia mulai menjadi jurnalis profesional saat menjadi jurnalis di Kantor Berita Radio (KBR)68H Jakarta, 2009. Kini ia aktif sebagai wartawan surat Kabar Harian Jogja. Lulus sebagai sarjana Ilmu Politik pada 2008, Bhekti tertarik dan kerap meliput isu-isu mengenai politik hukum, pemerintahan, kebijakan dan anggaran.

Sejak mulai bekerja di media lokal Harian Jogja pada 2010, perempuan kelahiran Ketapang, Kalimantan Barat 27 tahun silam itu selalu mengangkat berbagai isu terkait kebijakan dan anggaran di daerah. Pada tahun yang sama ia mulai bergabung dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta hingga sekarang. Selain menyangkut politik hukum, ia juga tertarik dengan isu-isu lingkungan. Kini ia juga aktif di komunitas Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ)). Tulisan-tulisannya mengenai lingkungan diantaranya pernah dibukukan dalam buku berjudul “Jurnalis Dan Perubahan Iklim Di Indonesia”.

## BAGIAN I

# BEREBUT ANGGARAN HIBAH-BANSOS

*Anggaran hibah dan bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bantul ditengarai kerap menjadi modal kampanye para anggota dewan yang kembali maju sebagai calon anggota legislatif melalui Pemilu 2014. Lewat tangan perantara, anggaran puluhan miliar itu digelontorkan ke masyarakat berupa pembangunan fisik. Syaratnya, warga memilih si pemberi bantuan saat di bilik suara. Bagaimana dana itu dibagi-bagi untuk modal kampanye, berikut laporan wartawan Harian Jogja Bhekti Suryani.*

**A**wal Oktober lalu, Kabupaten Bantul geger. Ribuan guru dan petugas Puskesmas ramai-ramai berunjukrasa mendesak segera disetujuinya APBD Perubahan 2013 oleh DPRD dan Pemkab. Persetujuan APBD Perubahan berjalan alot lantaran dewan dan Pemkab belum sepakat memutuskan besaran anggaran hibah dan bantuan sosial (bansos) yang akan digelontorkan ke masyarakat. Pasalnya, anggaran yang kondang disebut kalangan dewan sebagai dana aspirasi itu, bakal menentukan keberhasilan Pemilu legislatif 2014.

Aroma tarik menarik dana hibah dan bansos begitu kuat di penghujung September hingga awal Oktober lalu. Bupati

Bantul Sri Suryawidati dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bahkan menggelar jumpa pers soal darurat pemerintahan Bantul bila APBD tak kunjung disetujui akibat terganjal hibah-bansos.

Ketua Fraksi PDIP Hanung Rahardjo menuding sejumlah fraksi berkeras tak mau mengurangi besaran anggaran hibah dan bansos yang rencananya bakal dianggarkan kurang lebih Rp80 miliar (APBD murni dan perubahan). Anggaran harus dikurangi karena Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terbaru No.39/2012 tentang penyaluran hibah-bansos memperketat penggelontoran dana tersebut.

Bentuk pengetatan antara lain mengharuskan penerima bantuan terverifikasi dan datanya dilampirkan sebagai satu kesatuan dengan berkas APBD. Dewan menyebut, ada lebih dari 21.000 proposal bantuan warga yang mengajukan dana hibah dan bansos, sementara hanya 10 persen sampai 20 persen yang telah diverifikasi.

Mau tak mau, bila tak mau melanggar hukum, anggaran hibah dan bansos harus dipangkas dan hanya dianggarkan yang telah terverifikasi. "Kalau fraksi kami mau saja dipangkas, pakai anggaran yang ditetapkan pada APBD murni saja sebesar lima puluh tiga miliar rupiah. Tapi teman-teman fraksi lain belum tentu setuju," kata Hanung akhir September lalu.

Sejumlah fraksi di antaranya Fraksi Karya Bangsa (FKB), Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional berang dewan dituding sebagai biang keladi mulurnya persetujuan APBD lantaran tak mau memangkas anggaran hibah dan bansos. Mulurnya penganggaran ini berujung demonstrasi ribuan guru, menekan anggota dewan menyetujui APBD.

Tak terima dianggap sebagai biang kerok, sejumlah anggota dewan mulai bicara soal fakta tarik-menarik dana

hibah-bansos yang selalu melonjak drastis menjelang pemilu, baik saat 2009 maupun 2014. Ketua Fraksi PAN Sarinto mengungkapkan, mulanya pembahasan hibah-bansos karena partai koalisi pemerintah di antaranya PDIP dan Pemkab Bantul tak mau memangkas anggaran hibah dan bansos yang menjadi porsi mereka.

Menurutnya, selama ini anggaran hibah-bansos yang bersumber dari APBD alias pajak rakyat itu dibagi menjadi dua. Pertama untuk membiayai proposal bantuan masyarakat yang masuk lewat tangan anggota dewan (termasuk untuk anggota dewan dari partai koalisi) dan kedua untuk membiayai proposal yang masuk langsung ke Bupati yang di dalamnya juga untuk partai koalisi.

Pada APBD murni 2013, kata Sarinto, dianggarkan Rp53 miliar untuk hibah-bansos. Sejumlah Rp44 miliar untuk membiayai proposal yang masuk ke Bupati, sisanya Rp9 miliar untuk membiayai proposal yang disampaikan lewat 45 anggota dewan. Rencananya, sebelum heboh pembahasan APBD Perubahan hingga akhirnya anggaran hibah-bansos ditiadakan tahun ini oleh sidang paripurna dewan, dana hibah-bansos bakal ditambah Rp27 miliar lagi. Masing-masing “kubu” mendapat jatah Rp13,5 miliar.

“Karena ada Permendagri diminta dipangkas, mereka [bupati dan partai koalisi] tidak mau memangkas bagian mereka, padahal di APBD murni sudah dapat empat puluh empat miliar rupiah. Maunya bagian dewan yang jumlahnya kecil yang dipangkas, *ya* kami tidak mau,” katanya kepada media sembari menunjukan kertas berisi coretan angka pembagian dana hibah.

Namun ia menegaskan, meski ada mekanisme pembagian anggaran hibah dan bansos antara pemerintah dan anggota

dewan, dana itu tak masuk kantong pribadi. Anggaran itu untuk memenuhi permohonan bantuan seperti pembangunan rumah, selokan, jalan dan lainnya yang datang dari konstituen mereka. Pencairan dana pun langsung dilakukan oleh pemerintah kabupaten melalui Bagian Administrasi Pembangunan dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

Sarinto juga membantah dana itu sebagai modal kampanye. "Saya sudah banyak memasukkan proposal dari warga untuk dicairkan. Kalau saya, memang untuk membantu, tidak terkait apa-apa. Kalau menunggu birokrasi Pemkab, (bisa) lama," katanya.

Hal serupa juga diungkapkan anggota dewan Agung Wisdha. Di sela-sela demonstrasi ribuan guru pada 3 Oktober lalu, politisi Partai Karya Peduli Bangsa yang tak lagi maju sebagai caleg di 2014 itu menguatkan fakta yang ada. Menurutnya, dana hibah-bansos di kalangan dewan familiar dengan sebutan dana aspirasi. Tak heran bila ada rumor berkembang bahwa masing-masing anggota dewan yang berjumlah 45 orang pada APBD Perubahan tahun ini bakal mendapat jatah Rp300 juta atau total Rp13,5 miliar.

Dana dari pos anggaran hibah dan bansos itu untuk membiayai konstituen mereka yang mengajukan bantuan karena hampir seluruh anggota dewan saat ini maju lagi sebagai caleg 2014 alias calon *incumbent*. Tradisi bagi-bagi anggaran itu, menurutnya, sudah berlangsung lama. Porsinya selalu membesar menjelang pemilu untuk mengamankan konstituen. Karena itu, tak mengherankan rapat Badan Anggaran Dewan saat membahas dana hibah-bansos selalu "memanas".

"Dari dulu sudah begitu. Antara dua ratus juta sampai tiga

ratus juta rupiah satu orang. Saya juga (mendapat) sejumlah itu, entah proposal yang masuk ke saya cuma puluhan tapi pagunya sebesar itu,” kata Agung.

Padahal, dalam Permendagri jelas disebutkan, tujuan penganggaran dana hibah dan bansos untuk menunjang pencapaian program pemerintah. Anggaran harus dilaksanakan secara adil, patut, rasional dan memiliki kemanfaatan bagi masyarakat alias tak terkait politik.

Ihwal bagi-bagi anggaran hibah bansos dibantah Hanung Rahardjo. “Tidak benar seperti itu. Warga yang dibantu yang memang mengajukan bantuan lebih awal. Silakan cek penerima bantuannya. Bukan karena dari partai mana makanya diberi bantuan,” kata Hanung.

### **TREN DANA BANSOS DAN HIBAH APBD BANTUL DARI TAHUN KE TAHUN**

<b>TAHUN</b>	<b>HIBAH</b>	<b>BANSOS</b>
2008	Rp11,190 miliar	Rp68,2 miliar
2009	Rp29,7 miliar	Rp59,1 miliar
2010	Rp18 miliar	Rp33,2 miliar
2011	Rp24 miliar	Rp38,2 miliar
2012	Rp15,3 miliar	Rp10,5 miliar
2013*	Rp40,02 miliar	Rp29,1 miliar

\*NOTA KEUANGAN APBD PERUBAHAN

SUMBER :APBD BANTUL DAN NOTA KEUANGAN APBD PERUBAHAN

Demikial pula soal pagu Rp300 juta. “Mungkin itu estimasi saja tiap orang dewan berapa konstituen yang mengajukan bantuan. Kalau saya tidak setuju pakai pagu begitu, silakan warga mengakses bantuan yang ada bisa sebanyak-banyaknya,” kata Hanung lagi.

Bupati Bantul Sri Suryawidati dan Sekretaris Daerah Riyantono juga angkat bicara soal dana hibah dan bansos. “Tidak ada proposal yang diprioritaskan. Bukan karena dari dewan maka pencairannya dipercepat atau apa tapi berdasarkan siapa yang lebih dulu mengajukan dan layak atau tidak untuk dibantu,” kata Riyantono.

Sri Suryawidati juga pernah angkat bicara. “Boleh saja *to*, proposal masuk lewat dewan. Mereka *kan* juga menyampaikan aspirasi masyarakat,” kata Ida, sapaan akrabnya beberapa waktu lalu.



## BAGIAN II

# DANA CAIR JANGAN LUPA COBLOS

*Penggelontoran dana hibah dan bantuan sosial (bansos) ke masyarakat Bantul dari anggota dewan yang juga caleg Pemilu 2014 ditengarai sarat praktik percaloan. Dimaksudkan untuk meraih suara pada Pemilu tahun depan, penggelontoran anggaran itu di sejumlah daerah justru menuai masalah. Bagaimana dana hibah-bansos digunakan untuk meraih suara? Berikut laporan wartawan Harian Jogja, Bhekti Suryani.*

**W**isnu (bukan nama sebenarnya) sudah berkali-kali menerima laporan dari warga Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, perihal kampanye terselubung salah seorang calon anggota legislatif (caleg) di desa itu menjelang Pemilu 2014 mendatang. Anggota DPRD Bantul yang meminta identitasnya dirahasiakan itu menunjukkan pesan singkat (SMS) yang ia terima dari warga Dlingo ke *Harian Jogja*. Pesan itu berisi ajakan kepada warga Desa Dlingo agar memilih seorang caleg yang menggelontorkan bantuan hibah-bansos beberapa bulan lalu ke warga Dlingo yang merupakan daerah pemilihannya. SMS itu beredar bak pesan berantai dari satu warga ke warga lainnya. “SMS itu bunyinya, setelah mendapat bantuan, pilih caleg dari partai A,” kata sumber itu awal Oktober lalu.

Pesan singkat itu disebarakan oleh perantara atau tim sukses caleg yang memfasilitasi pengajuan proposal bantuan dana hibah-bansos dari warga. “Tentu untuk di lapangan, caleg tidak bisa mengurus sendiri, ada perantaranya yang mengumpulkan proposal-proposal itu ke caleg yang juga dewan,” katanya.

Parahnya lagi, kata dia, sejumlah warga melaporkan, bantuan tak diterima utuh lantaran harus ada *fee* alias uang jasa yang diberikan ke perantara. Jumlahnya berkisar ratusan ribu rupiah per penerima bantuan.

Ihwal perantara pengurusan proposal diakui pula oleh Budi. Warga Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, ini biasa memfasilitasi proposal warga yang diajukan ke anggota dewan maupun Pemkab Bantul. Lelaki yang telah 13 tahun mengurus pencairan proposal bantuan hibah-bansos itu mengakui selalu ada pesan dari caleg atau anggota dewan yang memperjuangkan cairnya bantuan ke warga. Di tempat Budi modusnya tak lewat pesan singkat.

“Kalau di tempat saya, biasanya menyampaikan pesan lewat saya ke warga supaya nanti mendukung dia. Atau lewat sosialisasi minta restu mau ikut Pemilu. Kalau saya *seh* sampaikan apa adanya, cuma urusan di bilik suara itu soal lain,” tuturnya ditemui Selasa (22/10).

Namun soal uang jasa untuk perantara, Budi membantah. “Kalau saya tidak pernah begitu. Saya menolong warga murni karena saya ingin bantu. Jumlah proposal yang sudah saya bantu tidak terhitung lagi jumlahnya,” tuturnya.

Menurut Budi, upaya mengarahkan pilihan warga terhadap caleg “pemberi bantuan” biasanya juga dilakukan oleh simpatisan partai caleg tersebut. Seorang kader salah satu partai di Kasihan, Bantul, yang juga meminta identitasnya

dirahasiakan, mengakui perihal penggunaan dana hibah dan bansos untuk meraih dukungan warga. Demikian pula soal uang jasa. “Pastilah kalau untuk kampanye mereka [caleg] titip pesan. Kalau terima uang *ya* pasti ada, banyak kalau begitu,” katanya.

Masalahnya, kata sumber itu, uang jasa untuk membayar perantara kadang memotong dana bantuan. “Kalau tidak memotong dana bantuan, dari mana lagi. Memangnya warga penerima bantuan mau merogoh saku pribadi [untuk membayar jasa perantara]. Itu saja sudah syukur mau dibantu,” ujarnya.

Di sejumlah dusun di Dlingo, penggelontoran dana bantuan tersebut justru menuai masalah. Ernawati, salah satu warga Dusun Pokoh, Desa Dlingo, saat ditemui akhir pekan lalu mengatakan, banyak bantuan hibah dan bansos yang tidak tepat sasaran. “Harusnya yang menerima warga tidak mampu, tapi karena yang dekat dengan caleg itu warga mampu, jadi dia yang dapat. Misalnya saja orang tua saya, mau dapat justru dialihkan,” katanya.

Ernawati menambahkan, warga selama ini tak tahu menahu soal seluk-beluk bantuan hibah-bansos. Tiba-tiba ada pengurus RT, Dukuh atau perantara yang datang ke rumah warga dan menawarkan bantuan. Masyarakat, kata dia, juga tak pernah membuat proposal bantuan kendati jumlah proposal yang masuk ke Pemkab mencapai puluhan ribu berkas. “Proposal itu sudah ada yang buat mereka yang mengurus bantuan itu. Warga cuma didatangi, mau tidak dibantu bikin dinding, tapi harus selesai sebulan atau dua bulan, cuma begitu,” katanya.

Terpisah, Mesiem, salah satu penerima bansos di Dlingo, menuturkan, ia tak pernah menerima bantuan dalam bentuk

dana segar. “Kata Pak Dukuh, nilai bantuan enam juta. Tapi yang diantar bukan uang, sudah material seperti dua puluh lima sak semen, pasir dan besi. Karena saya anggap sudah syukur dapat bantuan, jadi saya enggak *nanya-nanya* lagi,” kata Mesiem.

### BAGIAN III (HABIS)

## KORUPSI POLITIK DI HIBAH-BANSOS

*Penggunaan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) di APBD Bantul untuk meraih suara pada Pemilu 2014 oleh para calon legislatif (caleg) dinilai sebagai bentuk korupsi politik. Penganggaran dana hibah-bansos pun diminta lebih transparan agar tak rentan disalahgunakan.*

**P**engajar pada Jurusan Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik (Fisipol) UGM Mashuri Maschab menyatakan, tradisi berbagi anggaran hibah-bansos APBD di kalangan dewan sudah lazim di tingkat pusat maupun daerah. “Di pusat sama saja, ada banyak anggota dewan yang datang ke warga menawarkan bantuan dan membawa proposal. Sampai ada yang bilang mereka ini dewan atau calo anggaran,” kata Mashuri, Rabu (23/10).

Mashuri menyatakan, anggaran itu legal dan merupakan hak masyarakat terkecuali bila ternyata dipotong oleh caleg tersebut seperti yang pernah terjadi di sebuah daerah di Jawa Tengah. Namun bila anggaran itu ternyata digunakan untuk mendongkrak elektabilitas caleg tersebut tentu tak adil. Tak adil terutama bagi caleg *nonincumbent* yang tak punya akses ke APBD.

Tradisi seperti itu, menurut Mashuri, buruk bagi sistem

Pemilu. Mashuri menyebut kondisi itu sebagai korupsi politik yakni menggunakan kewenangan mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan elektabilitas atau keterpilihan caleg. “Korupsi politik itu *kan* menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk memanipulasi [meningkatkan suara],” katanya.

Selain tidak adil bagi sistem Pemilu. Dampaknya kata dia, masyarakat juga dirugikan. Misalnya bila ada masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan namun karena bukan konstituen caleg tersebut maka akan luput dari bantuan. “Tentu dia hanya akan mementingkan konstituen dia ketimbang masyarakat lain yang bisa saja lebih membutuhkan bantuan,” tuturnya.

Lebih parah lagi bila ternyata dana tersebut disalahgunakan seperti disunat. Seperti diberitakan media ini sebelumnya, di lapangan beredar luas pemotongan dana bantuan masyarakat oleh perantara atau tim sukses caleg yang mengkoordinasi proposal dari warga. Mashuri menyarankan, agar Pemkab Bantul membuka seterang-terangnya soal pos anggaran tersebut. “Kalau ini diumumkan sejelas-jelasnya ke masyarakat bahwa ada dana hibah-bansos yang memang menjadi hak masyarakat, mereka akan menyampaikannya langsung ke Pemkab tidak harus lewat dewan,” katanya.

Ketua LSM Idea Yogya, Wasingatu Zakia, juga berpendapat, dana hibah-bansos sangat rentan disalahgunakan untuk tujuan politik. Bila demikian, maka wargalah yang akhirnya dirugikan. “Cermati saja bila anggaran itu naik, pasti ada pos lain yang harus dipangkas, entah itu anggaran kesehatan atau lainnya yang jauh lebih penting untuk masyarakat,” kata perempuan yang biasa disapa Zaki itu. Menurutnya, penyalahgunaan dana hibah-bansos sudah sering terjadi menjelang Pemilu. Ia meminta masyarakat berpartisipasi mengawasi penggunaan anggaran tersebut.

Sebelumnya, Anggota Fraksi Karya Bangsa (FKB) Aslam Ridha menolak bila upaya dewan membiayai proposal konstituen dianggap sebagai hal negatif. “Kami ini tugasnya memperjuangkan kepentingan konstituen jadi jangan membodohi masyarakat dengan menganggap hal itu salah,” kata politisi PKB itu beberapa waktu lalu.



**HEDITIA DAMANIK** kelahiran Simalungun, Sumatera Utara, 6 Agustus 1989. Dia menjadi wartawan desk politik pemerintahan di Jawa Pos Radar Jogja sejak 2011. Saat ini sedang menempuh kuliah magisternya bidang Diplomasia Kemanusiaan di Universitas Gadjah Mada Jogjakarta.

Heditia Damanik, Wartawan *Radar Jogja*



# BANSOS PANADOL PEMROV YANG TAK MANJUR

**\*TARGET PENURUNAN KEMISKINAN DUA PERSEN  
MELESET**

**B**antuan sosial (bansos) 'Panadol' ala Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepertinya tidak sesuai yang diharapkan. Target penurunan kemiskinan dua persen dipastikan meleset.

Dalam APBD 2013, Pemprov menggelontorkan dana Rp46,580 miliar untuk menurunkan angka kemiskinan di DIY dua persen di tahun ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, data kemiskinan per maret 2013 berkisar 15,43 persen atau 550.190 jiwa dari total penduduk sekitar 3,5 juta jiwa.

Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Tavip Agus Rayanto sengaja menyebutnya bansos Panadol (obat sakit kepala) karena bertujuan untuk menghilangkan rasa sakit, dalam hal ini kemiskinan, dalam waktu singkat dan instan lewat intervensi bansos.

Pemprov terkesan ambisius untuk menurunkan angka kemiskinan dalam persentase yang cukup besar dalam waktu satu tahun. Pada awal 2013, Tavip menyampaikan bahwa paska disahkan undang undang keistimewaan (UUK) pada Agustus 2012, Gubernur DIY Hamengku Buwono X ingin menunjukkan kerja nyata. Bansos Panadol ini belum pernah dicoba di tahun-tahun sebelumnya. "Targetnya itu penurunan

kemiskinan dua persen,” katanya awal tahun silam.

Kerjasama pun dilakukan dengan BPS DIY untuk memetakan dua persen orang miskin di DIY berdasarkan nama, alamat, pekerjaan, dan sebab kemiskinannya. Terjangirlah 46.580 rumah tangga sasaran (RTS) produktif yang bisa diintervensi dengan bansos. Mekanismenya, setiap RTS mendapat bantuan Rp 1 juta/ RTS. Kemudian sejumlah RTS, misalnya sepuluh RTS membuat kelompok. Selanjutnya uang yang mereka terima dikumpulkan untuk menjadi modal ekonomi produktif.

Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY, pada bulan Juni lalu, Pemprov DIY sudah mentransfer dana tersebut ke kabupaten/ masing-masing. Alokasi terbanyak kepada Gunungkidul Rp16,615 miliar (16.615 RTS), Bantul Rp13,125 miliar (13.125 RTS), Sleman Rp8,190 miliar (8.190 RTS), Kulonprogo Rp6,709 miliar (Rp 6.709 RTS) dan yang paling sedikit Kota Yogyakarta memperoleh Rp1,941 miliar (1.941 RTS). Menurut Kepala Bidang Belanja DPPKA DIY Aris Indarto, pemerintah kabupaten dan kota yang langsung menyalurkan bansos tersebut ke masyarakat.

Menurut Kepala BPS DIY Wien Kusdiatmono, dalam perencanaan awal, bansos tersebut akan dicairkan pada bulan Juli kepada RTS. Kemudian usaha kelompok bisa berjalan bulan Juli, Agustus dan September. Lalu pada bulan september, ada survei ekonomi dan sosial yang dilakukan BPS untuk memotret kemiskinan di Indonesia.

“Dalam pemotretan di bulan September itu, harapannya bisa kita ketahui kalau angka kemiskinan turun dua persen,” kata Wien saat didatangi Radar Yogyakarta di kantor BPS Jalan Ringroad Selatan Bantul dua hari lalu (22/10).

Rupanya harapan tinggal harapan saja. Pada bulan Juli, belum semua Bansos dialokasikan ke kelompok – kelompok. Bahkan hingga saat ini masih banyak yang baru mengalokasikan sebagian. Hal tersebut membuat rencana awal tidak berjalan seperti yang diharapkan. BPS sudah melakukan pemotretan kemiskinan di bulan September lalu. Walau hasilnya perhitungannya baru keluar pada bulan Desember, tapi Wien yakin bansos “Panadol” ini tak berhasil. “Meleset. Jauh api dari panggangan. Agak kecewa juga saya,” katanya.

Setidaknya ada tiga faktor yang membuat target ini bisa meleset. Pertama, kenaikan BBM pada bulan Juli yang tidak terduga dan menyebabkan inflasi meningkat. Kedua, penyerapan bansos yang tidak tepat waktu. Kalau pun duitnya sudah dicairkan, ternyata tidak digunakan untuk membuat usaha yang bisa menghasilkan perbaikan ekonomi secara cepat.

“Kayak di Gunungkidul itu sudah dibagi, tapi dibelikan kambing. Padahal kambing itu kan baru beranak setahun kemudian. Ya susah juga. Saya sudah usulkan kemarin untuk beternak lele misalnya, yang tiga bulan sudah panen. Atau berjualan makan ringan, yang bisa menghasilkan lebih cepat,” kata Wien.

Skema yang dibangun oleh Pemprov dan BPS diakuinya tidak berjalan dengan baik. “Iya (tidak berjalan dengan baik). Sebenarnya selama di sini, saya ingin bantu Pemprov menurunkan kemiskinan. Tapi Yogyakarta ini memang beda ternyata,” katanya.

Tavip juga mengakui hal yang sama. Dari hasil evaluasi yang dilakukan dengan tim penanggulangan kemiskinan kabupaten/ kota, diketahui terdapat sejumlah kesulitan yang ditemukan di lapangan yang menyebabkan bansos belum

dicairkan hingga bulan Oktober.

Pertama, banyak kelompok yang belum terbentuk. Kedua, skenario usaha berbeda-beda dan ada yang kurang tepat dengan target Pemprov. Ada yang menggunakannya untuk usaha yang menguntungkan dalam jangka pendek seperti berwirausaha tapi ada pula yang jangka panjang seperti peternakan dan pertanian. “Dampak penurunan kemiskinan dalam jangka pendek ya tidak bisa dirasakan saat ini kalau hanya fokus pada peternakan atau pertanian,” kata dosen di Magister Administrasi Publik UGM itu.

Selain itu, lanjutnya, resistensi di tingkat pemerintah desa juga tinggi. Menurut pria yang tinggal di Sewon itu, kepala desa berhati-hati menyalurkan bansos itu. Walau BPS sudah melakukan kajian kemiskinan dari data Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011, tapi ternyata praktik di lapangan tidak mudah.

“Ada kepala desa yang takut dimusuhi warganya karena ada orang miskin lain yang tidak ter-cover meskipun kami sudah beri pemahaman bahwa sasaran dari bansos ini adalah orang miskin yang produktif,” kata birokrat yang piawai bermain saksofon itu.

Bansos yang tak tersalurkan dengan tepat waktu terlihat di lapangan. Misalnya di Kota Yogyakarta, salah satu yang berhak menerima, Bejo Saputro, mengaku belum menerima bansos itu. Bejo adalah warga RT 07 RW 02 Dipowinatan, Keprakan, Kota Yogyakarta. Dia sendiri sudah dimintai data dan tanda tangan oleh pihak kelurahan. Bahkan dia sudah membentuk kelompok yang terdiri dari 10 orang. Beberapa waktu lalu, kata dia, kelompoknya sempat dikumpulkan untuk merevisi sejumlah tanda tangan.

“Tapi ya sudah, habis itu belum ada informasi lagi. Dari

kelurahan juga belum tahu,” kata pegawai di warung jasa fotokopi di Jalan Brigjen Katamsa Yogyakarta itu.

Padahal Bejo sudah punya rencana. Kalau duit itu dicairkan, dia akan menggunakannya untuk berjualan bensin eceran. Dulu, dia sudah pernah jualan bensin eceran hanya saja gulung tikar. Kali ini dia ingin memulai kembali usaha tersebut. Bejo menyatakan akan membentuk kelompok namun untuk pengelolaan duitnya dilakukan secara pribadi. “Yang pasti digunakan buat jualan (usaha),” katanya.

Secara terpisah, Kepala Bappeda Kota Yogyakarta Edi Muhammad mengakui memang belum semua kelompok di Kota mendapatkan dana. Ada beberapa persoalan administrasi yang harus tuntas. “Memang tidak secara bersamaan. Karena pengajuan kelompoknya juga tidak serentak antara yang satu dengan yang lain,” kata Edi saat dihubungi Radar Yogyakarta (21/10).

Pemerintah Kota Yogyakarta sendiri mendapatkan Rp1,94 miliar untuk 1.941 RTS. Dia mengklaim bahwa tidak ada persoalan pencairan bansos di Pemkot. Memang pemerintah harus mengganti beberapa penerima karena ada yang meninggal, pindah, dan menolak Bansos. “Ada yang menolak bansos, satu orang. Itu malah kami apresiasi. Ini kami carikan penggantinya,” kata Edi.

Soal pengelolaan, Pemprov menginginkan agar bansos dikelola secara komunal. Pengawasan dilakukan oleh pihak Kelurahan dan Kecamatan. Namun menurut Edi, kesepakatannya adalah Pemkot/ Pemkab diberi kebebasan untuk mengatur soal pengelolaan. Pemkot sendiri sampai membentuk peraturan walikota (perwal) tentang pengelolaan dana bantuan khusus penanggulangan kemiskinan untuk menindaklanjuti bansos “Panadol” itu. “Di perwal kami

bebaskan pada kelurahan, apakah uang itu mau dikelola secara kelompok atau individual,” katanya.

Edi yakin bansos ini bisa terserap di masyarakat bila dilaksanakan dengan maksimal.

Sementara Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis UGM Rimawan menjelaskan bahwa tolak ukur keberhasilan Pemerintah dalam anggaran bukan hanya persoalan serapan. “Tapi juga tentang kesesuaian antara target dalam perencanaan program atau kegiatan dengan realisasinya,” kata Rimawan.

## **TAK TEPAT SASARAN**

Saat menggalang aspirasi masyarakat di Gunungkidul, Anggota Komisi D DPRD DIY Esti Wijayati menerima keluhan dari warga soal bansos “Panadol” ini. Di Dukuh Goa Sriti, Dukut, diketahui ada warga mampu yang memiliki sejumlah kerbau mendapatkan bantuan bansos. “Mereka bilang banyak warga yang lebih miskin,” kata Politikus PDIP tersebut.

Tavip mengatakan percaya pada data BPS yang diandalkan untuk membagi-bagi dana bansos itu. Salah atau tidak, Tavip merasa tidak memiliki kompetensi untuk mengatakan hal itu. BPS, lanjutnya, memiliki metode survei dan memiliki petugas lapangan. Mungkin, sambung Tavip, di seluruh pemangku kepentingan atas bansos ini masih ada *gap* pendefinisian kemiskinan.

“Saya juga tidak punya wewenang untuk mengganti penerima. Karena yang bisa melakukan pergantian bila ada yang pindah atau meninggal adalah bupati/ wali kota,” ujar mantan Kepala Asisten Sekretaris Provinsi Bidang Pemerintahan dan Kesra itu.

Wien, lebih lanjut menjelaskan penerima 46.580 RTS tersebut dikaji dari data Program Perlindungan Sosial (PPLS)

2011 yang dipimpin oleh Wakil Presiden Boediono. Kriteria yang dipilih BPS adalah orang miskin yang hampir keluar dari garis kemiskinan. Definisi miskin adalah keluarga dengan pengeluaran per kapita di bawah Rp280 ribu per bulan. Hal ini berbeda dengan pemahaman banyak orang selama ini. Kemiskinan kerap diidentikkan dengan pendapatan yang minim. Sebaliknya, BPS mengukurnya dari pengeluaran.

“Kami menghitungnya dari pengeluaran, bukan pendapatan. Kalau pendapatan itu tidak bisa dijadikan acuan. Pengemis itu pendapatannya bisa jauh lebih banyak dari pada yang bekerja di kantor,” kata dia.

Wajar banyak yang menilai tidak tepat sasaran. Wien menerangkan kemiskinan bisa menempel pada siapa saja termasuk PNS. Misalnya PNS golongan II yang memiliki anak delapan orang. “Kalau pendapatannya cuma Rp2 juta, tapi yang dihidupi ada sepuluh orang, maka pengeluaran per kapita mereka adalah Rp200 ribu. Itu termasuk miskin,” katanya.

## **KECURIGAAN POLITIK BANSOS**

Pembagian bansos “Panadol” Rp 46 miliar ini, rupanya memunculkan kecurigaan politikus DPRD tingkat II sampai DPRD Provinsi. Memang sudah menjadi rahasia umum di tingkat elite bahwa program bansos menjadi bancakan bagi para anggota dewan.

Salah seorang anggota DPRD DIY yang tak mau disebut namanya mengatakan, dalam APBD 2013, tiap anggota dewan mendapatkan angggaran bansos masing-masing kurang lebih Rp1 miliar yang posnya tersebar di beragam satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Banyak proposal dari konstituen yang masuk ke anggota-anggota dewan. “Jadi tak heran

kalau DPRD itu kan 'Dewan Proposal Rakyat Daerah'," kata politikus itu.

Sementara Ketua DPRD Kulonprogo, Ponimin, melihat bansos ini sarat kepentingan politik 2014. Dia berpendapat Pemkab Kulonprogo seharusnya mengecek ulang penerima bansos yang datanya dari Badan Pusat Statistik (BPS) DIY. Sebab, Kulonprogo punya data kemiskinan sendiri, baik di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; maupun Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan. Pemberian bantuan, kata Ponimin, mestinya tidak menyampingkan data milik daerah itu. "Data harus valid. Data itu kan dari politikus to," katanya.

Ponimin menerima laporan dari Pemkab, bahwa banyak penerima bansos yang tidak tepat sasaran. Misalnya di Desa Nanggulan, dari 25 RTS yang menerima, 90 persennya dirasa tidak tepat sasaran. "Itu laporannya. Jangan sampai ada kesenjangan di masyarakat," katanya.

Anggota DPRD DIY Esti Wijayati mengatakan dewan tidak tahu-menahu soal penerima bansos "Panadol" ini. Penerima bansos ditentukan sepenuhnya oleh BPS. "Kami tidak tahu apa-apa. Itu yang punya program kan Pemprov bersama BPS," kata politikus PDIP tersebut.

Kepala BPS DIY Wien Kusdiatmono menegaskan bahwa BPS bebas dari kepentingan politik partai apapun. Dia mengatakan data yang dibuat oleh BPS, murni hasil sampel di lapangan. Wien bersikeras tetap menjaga netralitas institusinya dari kepentingan-kepentingan politik elite. "Pure (murni). Saya tak ada sangkut-pautnya dengan partai. Itu data tidak bisa diubah-ubah," katanya.

Meski begitu, kekhawatiran terhadap penyalahgunaan bansos untuk kepentingan politik memang besar. Anggota



Perkumpulan IDEA Valentina Sri Wijiyati menyampaikan dana bansos bisa digunakan para politikus menjelang Pemilihan Umum 2014. Bansos bisa diklaim sebagai hasil kerja dari anggota dewan.

Ketua IDEA, Wasingatu Zakiyah, dalam pelatihan penguatan kapasitas jurnalis yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) dan United States Aid (USAID) bulan September lalu, menyatakan eksekutif dan legislatif sering bersahabat dalam mengutak-atik anggaran. “Ada anggaran yang saling titip. Misalnya dewan menitip ke pemerintah. Tergantung kuat-kuatan siapa. Kalau dewan yang kuat, maka akan titip anggaran ke dewan. Kalau eksekutif kuat, maka dia akan titip ke fraksi-fraksi,” katanya saat menjelaskan materi anatomi korupsi anggaran.

Wiji juga mempertanyakan akuntabilitas atau pertanggungjawabannya dana bansos ini. Pengawasan yang minim akan membuat dana menguap begitu saja. Ia menilai bansos tidak efektif untuk mengentaskan kemiskinan karena masyarakat dididik hanya untuk menerima bantuan. “Ibaratnya cuma dikasih ikan, tapi tidak dikasih kail untuk menangkap ikan,” katanya. (hed)

### **KAPOK BANSOS “PANADOL”?**

Pesimisme terhadap keberhasilan program bansos panadol ini memang tidak terelakkan lagi. Tavip mengatakan Pemprov akan segera melakukan evaluasi lagi bersama dengan tim penanggulangan kemiskinan kabupaten/ kota. Mereka juga akan membicarakan soal skema penanganan kemiskinan di tahun depan. “Akan kami bahas, apakah skema seperti ini masih cocok atau tidak,” katanya.

Wien sendiri yakin bahwa skema yang disusun oleh BPS

tersebut bisa mengurangi kemiskinan. Ia bilang, cara ini pernah berhasil dilakukan bersama Pemprov Gorontalo beberapa tahun lalu. Dua tahun bansos dilakukan, angka kemiskinan di Gorontalo sekitar 23 persen. Pada intervensi tahun pertama, kemiskinan turun 1,83 persen. Sementara tahun kedua turun 4,44 persen.

Mekanismenya sama, hanya saja di Gorontalo yang diberikan adalah uang pinjaman dan bukan bansos seperti yang di DIY. Pemberian uang pinjaman tersebut agar masyarakat bisa bekerja untuk mengembalikan pinjaman. "Tapi karena DIY tidak punya anggaran yang besar untuk pinjaman, Gubernur meminta bentuknya Bansos," kata Wien.

Yogyakarta memang unik. Banyaknya orang pintar di Yogyakarta, rupanya menjadi salah satu rintangan dalam pengentasan kemiskinan BPS. Biasanya banyak yang akan mendefinisikan kemiskinan. Akhirnya, lebih banyak berdebat dari pada pelaksanaannya. Selain itu, lanjutnya, banyak yang tidak percaya pada data BPS karena memiliki data sendiri. "Kalau di sini, masih bicara ini, bicara itu. Banyak pertimbangan."

Dia membandingkan, saat di Gorontalo, tidak banyak perdebatan soal data BPS. Gubernur memerintahkan seluruh SKPD untuk menggarap kemiskinan berdasarkan data dari BPS. "Karena di sana mungkin tidak banyak orang sepintar di sini (DIY)," kata Wien.





**ABDUL HAKIM** namanya. Berkulit putih, jurnalis yang ramah dengan siapapun ini lahir pada 6 Juni, 1981 di Lamongan. Tulisannya yang berjudul “Mengurai Bau Busuk Penganggaran TPA Benowo,” ini menjadi karya terbaik pada lomba liputan transparansi anggaran yang digelar AJI Surabaya.

Hakim panggilan akrabnya telah lama berkecimpung pada dunia jurnalisme. Karirnya dimulai saat bergabung di Radar Kediri pada 2006-2007, kemudian di Berita Jatim pada 2007-2008. Dan saat ini ia bergabung di ANTARA.

Hakim kini tinggal di rumahnya sendirinya di Medayu utara 8/94-B, Kelurahan medokan ayu, Kecamatan Rungkut. Dikarunia satu anak perempuan, lulusan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Sosiologi Agama ini sangat bersyukur atas kemenangannya.

# MENGURAI BAU “BUSUK” PENGANGGARAN TPA BENOWO SURABAYA

**B**au busuk dari sampah yang menggunung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo Kota Surabaya yang luasnya 37,5 hektare itu begitu menyengat. Tidak heran jika mereka yang melintas di sekitar lokasi TPA Benowo akan mencium baunya dari kejauhan.

Namun bagaimana dengan ribuan pemulung dan warga yang tinggal di lokasi TPA Benowo? Jika pemulung tidak merasa terganggu dengan bau sampah tersebut karena sudah menjadi bagian dari pekerjaannya bukan berarti warga yang tinggal di sekitar lokasi TPA tidak terganggu.

Volume sampah organik dan nonorganik yang masuk ke TPA Benowo diperkirakan 1.500 ton per hari, di satu sisi menguntungkan pemulung, namun di sisi lain merugikan warga setempat. Warga seolah-olah dibuat tak berdaya dengan bau busuk sampah yang secara tidak langsung menimbulkan banyak penyakit itu.

Tanpa mereka sadari, senyawa-senyawa organik yang telah terurai dari sampah tersebut dapat mengakibatkan gangguan genetika dan reproduksi. Selain itu, tumpukan sampah merupakan tempat perkembangbiakan vektor-vektor pembawa penyakit. Lalat dapat menjadi pembawa utama dari kuman bakteri yang menyebabkan diare karena mudah

hinggap di makanan atau peralatan makan.

Tikus diketahui dapat membawa penyakit seperti tipus, leptospirosis, salmonellosis, pes dan lain-lain. Sedangkan serangga seperti lalat, kecoa, lipas, kutu, dan lainnya dapat membawa berbagai bakteri yang menyebabkan penyakit disentri dan diare. Nyamuk akan beranak-pinak di air yang tidak bergerak di sekitar sampah yang tercecer dan dapat menyebabkan malaria bahkan demam berdarah.

“Bau sampah itu yang ada setiap saat mengganggu kami,” kata salah seorang warga Benowo, Masduki.

Masduki mengatakan bertahun-tahun bau itu tidak pernah hilang. Warga setempat selama ini tidak bisa berbuat banyak, meski sering protes. Tidak ada hasilnya. Semua yang dilakukan seperti bau sampah yang menguap begitu saja dan selanjutnya datang lagi.

“Kami berharap pemerintah bisa cepat menanganani persoalan ini,” katanya.

Untuk mengurai sampah di TPA Benowo, beberapa cara telah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya. Salah satunya lelang investasi pengelolaan sampah dengan sistem kontrak kerja sama “Built Operate Transfer” (BOT) dengan anggaran yang harus dikeluarkan pemkot selama 20 tahun mencapai Rp362 miliar.

Pada saat lelang pertama digelar pada 2009, tidak ada peminat sama sekali. Kemudian lelang diulang lagi pada 2011 dan diperoleh empat investor yakni PT Phoenix (Singapura), PT Medco (Malaysia), PT Sumber Organik (Indonesia), dan PT Imantata (Prancis).

Lelang investasi pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) Benowo Kota Surabaya sempat molor akibat terjadi tarik ulur di antara panitia khusus (pansus) DPRD Surabaya

dalam menentukan investor. Sejumlah anggota DPRD Surabaya menduga ada skenario untuk memenangkan salah satu investor yakni PT Sumber Organik.

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Akhmad Suyanto, saat itu menyatakan indikasi untuk memenangkan salah satu investor sudah ada. Namun dia tidak mau mengungkapkan secara detail. "Indikasi sih ada," katanya singkat.

Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Erick Reginal Tahale, menyatakan Pemkot Surabaya telah menyalahi prosedur karena memenangkan PT Sumber Organik (PT SO) yang tidak sesuai dengan putusan Pansus DPRD Surabaya. Dalam putusan itu jelas-jelas dinyatakan pihak ketiga yang diajak kerja sama adalah investor yang dapat memberikan "*sharing profit*" terbesar serta "*tipping fee*" terkecil. "*Tipping fee*" ini adalah perhitungan biaya yang dikeluarkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya dalam mengelola sampah di TPA Benowo.

"Kewajiban pemkot hanya menyediakan lahan dan bangunan di TPA Benowo, mempermudah izin serta menyediakan bahan baku berupa sampah. Sekarang malah muncul angka senilai Rp56,6 miliar untuk '*tipping fee*'. Itu dari mana?" katanya.

Kenyataannya, perusahaan yang menawarkan "*tipping fee*" terendah malah kalah. Sumber di Pemkot Surabaya menyebutkan, PT Medco mengajukan nilai investasi Rp640 miliar dengan "*tipping fee*" Rp110 per kilogram sampah.

Kemudian, PT Imantata memiliki kemampuan investasi Rp284 miliar dengan "*tipping fee*" Rp100 per kg sampah. PT Phoenix akan investasi Rp360 miliar dengan *tipping fee* Rp 112 per kg sampah. Sedang PT SO mengajukan investasi senilai Rp314 miliar dengan *tipping fee* Rp119 per kg sampah.

Jadi, paling mahal “tipping fee” yang diajukan PT SO tapi tetap menang.

Anehnya lagi, lanjutnya, jika “tipping fee” Rp119 per kg sampah, seharusnya setahun hanya membutuhkan Rp44 miliar, namun dalam APBD Surabaya 2013, “tipping fee” diloloskan menjadi Rp56,6 miliar.

“Saya melihat prosedurnya salah semua, tidak melalui aturan main yang ada. Persoalan ini tidak lagi menjadi polemik, namun sudah harus menjadi sikap. Terutama Pemkot yang harus meninjau ulang,” katanya. Erick menegaskan jika Pemkot tetap menggunakan anggaran “tipping fee” Rp56,6 untuk PT SO, maka Ketua Panitia Lelang serta Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini harus bertanggung jawab karena ini sudah masuk dalam ranah pidana.

“Saat kami konsultasi dengan Mendagri, (kami sampaikan) proses (kebijakan) itu cacat hukum dan ‘tipping fee’ yang diajukan pemkot juga tidak sesuai prosedur. Untuk itu saya meminta wali kota membatalkannya,” ujarnya.

Ketua Panitia Khusus Pengelolaan Sampah TPA Benowo yang juga Wakil Ketua DPRD Surabaya Wisnu Sakti Buana saat itu mengatakan prosesnya telah sesuai prosedural dan berbalik menuding bahwa anggota dewan yang masih mempersoalkan karena misinya tidak tertampung.

Wisnu mengatakan pansus sendiri sudah sesuai aturan dan terbentuknya pansus mencari format kerja sama apa yang paling bagus. “Pansus sudah sesuai mekanisme dan kami sudah studi banding ke Bandung dan Bali. Bila ada anggota dewan yang melintir, itu karena kepentingan mereka yang tidak terakomodir,” katanya.

Ditanya bahwa proyek pengolahan sampah di TPA Benowo diatur oleh Wisnu bersama kakak kandungnya



(Seno), ia membantahnya dan menganggap itu hanya sebuah isu belaka. “Itu hanya isu. Kalau itu, saya difitnah malah mengurangi dosa saya,” kata Wisnu yang juga Ketua DPC PDIP Kota Surabaya ini.

## **TIDAK TRANSPARAN**

Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) menilai alokasi anggaran “tipping fee” pengelolaan sampah di TPA Benowo dalam APBD Surabaya 2013 tidak transparan. Tahun 2013 ini adalah tahun kedua bagi Pemkot kembali mengucurkan dana yang bersumber dari APBD Kota Surabaya senilai Rp56 miliar dan diusulkan ditambah Rp9 miliar dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).

“Saat ini persoalan persampahan di Kota Surabaya sangat menyita perhatian publik, dikarenakan tidak adanya transparansi dari PT Sumber Organik selaku pemenang tender yang bernomor 510/13799/436.6.5/2011 tertanggal 22 Agustus 2011 senilai kurang lebih Rp362 miliar,” kata Penasihat Umum AMAK, I Wayan Titib Sulaksana.

Menurut dia, pengolahan sampah menjadi gas dan listrik dengan sistem BOT merupakan cara yang terbaik untuk pembangunan infrastruktur baru dengan keterbatasan dana. Pelibatan pihak swasta terkait pembangunan konstruksi infrastruktur baru diperlukan. Prinsipnya, pendanaan swasta akan digunakan untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas atau sistem infrastruktur berdasarkan standar yang disusun pemerintah.

Tentunya proses BOT harus melalui persetujuan DPRD Kota Surabaya sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 50/2007 dan Peraturan Presiden Nomor 70/2012, serta Permendagri No 7/2007 tentang kerja sama pemerintah

daerah dengan pihak lain.

Kendati demikian, AMAK menyoroti membengkaknya anggaran “tipping fee” yang tertuang di dalam draf Kebijakan Umum Anggaran- Penghitungan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2013 senilai Rp44 miliar per tahun. Selanjutnya, saat pembahasan KUA-PPAS, anggaran tiba-tiba membengkak menjadi Rp56,4 miliar per tahun. Bahkan, di dalam pembahasan buku draf Rancangan APBD 2013 anggaran “tipping fee” itu menjadi Rp57,223 miliar per tahun.

“Ini berarti biaya pengolahan sampah per tonnya menjadi Rp152.000 per ton. Tidak sesuai dari perjanjian awalnya Rp119.000 per ton,” katanya.

Badan Anggaran DPRD Kota Surabaya akhirnya menolak penambahan anggaran pengelolaan sampah di TPA Benowo dalam PAK APBD 2013 yang semula dianggarkan Rp57 miliar naik menjadi Rp63 miliar atau senilai Rp6.042.938.000. “Rapat Banggar yang baru selesai pukul 18.00 WIB ini akhirnya sepakat menolak penambahan anggaran pengelolaan sampah,” kata anggota Badan Anggaran (Banggar) dari Fraksi PKS Reni Astuti.

Pemkot Surabaya sempat menghadirkan 10 pakar atau ahli dari berbagai unsur seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas), Universitas Airlangga (Unair), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan lainnya dalam rapat Banggar. “Semua pakar yang dihadirkan berkaitan dengan hal teknis, aspek legal, sampai pada aspek lingkungan,” kata Reni.

Menurut dia, salah satu pakar hukum yang didatangkan Pemkot Surabaya menjelaskan bahwa kerja sama antara Pemkot Surabaya dan Pengelolah Sampah dalam hal ini PT Sumber Organik (SO) harus ada persetujuan dari DPRD Surabaya. Sedangkan persetujuan yang dimaksud sesuai

dengan tata tertib DPRD Surabaya harus disetujui oleh semua anggota DPRD Surabaya dalam rapat paripurna.

Setelah tim ahli memaparkan, lanjut dia, muncul berbagai pertanyaan soal aspek legal kerja sama tersebut. Hal ini karena persetujuan tersebut hanya dilakukan di tataran pimpinan DPRD Surabaya dan tidak melibatkan anggota dewan secara keseluruhan.

“Mendapati banyaknya anggota dewan yang bertanya tersebut, tim ahli sempat kaget jika dewan hingga saat ini belum memegang perjanjian kerja sama itu,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, hal-hal lain terkait dengan penambahan anggaran pengelolaan sampah dinilai belum menyakinkan. Hal ini karena kewajiban dan hak dari Pemkot atas kerja sama belum bisa dijelaskan. “Pemkot belum memberikan gambaran atas itu, akhirnya kami sepakat menolak penambahan itu,” kata politikus PKS itu.

Wakil Ketua Komisi CDPRD Surabaya Simon Lekatompesy mengatakan kerja sama itu salah prosedur sehingga perlu adanya revisi. “Sebaiknya diadakan perbaikan supaya ke depan tidak ada masalah,” katanya.

Menurut dia, jika PT Sumber Organik menolak perbaikan itu, maka sebaiknya dibicarakan dengan Pemkot Surabaya. Perjanjian kerja sama pemerintah dengan PT Sumber Organik yang menggunakan sistem BOT seharusnya mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota DPRD Surabaya. Prosedur tersebut tidak dilakukan pada saat itu, melainkan hanya persetujuan melibatkan unsur pimpinan DPRD Surabaya. “Maka menurut saya, tinggal prosedurnya yang harus dibenarkan lagi. Bisa dicarikan solusi, kasihan juga pihak ketiga (investor),” katanya.

Hal sama juga diungkapkan Ketua DPRD Surabaya M.

Machmud. Ia setuju kerja sama tersebut direvisi agar ke depan tidak ada permasalahan lagi. “Ya, kami sepakat itu direvisi,” katanya.

Namun berbeda halnya dengan pernyataan anggota Komisi C lainnya, Sudirjo. Politisi Partai Amanat Nasional ini menegaskan tidak perlu revisi. “Kalau sudah salah dari awal, tentunya isi perjanjian juga salah. Tentunya harus di-cut (diputus--red) kerja samanya,” katanya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya Hendro Gunawan mengatakan mengenai rencana revisi kerja sama tersebut, pemerintah akan konsultasi terlebih dahulu dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas).

“Ini terkait penyempurnaannya saja. Pada saat rapat Banggar kemarin (1/10), dewan mengusulkan penyempurnaan persetujuan kerja sama itu saja,” katanya.

Hendro mengatakan tidak ada yang salah dengan kerja sama dengan PT SO, hanya saja perlu disempurnakan. “Kalau batal demi hukum berhenti semua terus semua berhenti. Secara substansi dan teknis juga tidak salah,” katanya.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta semua pihak melihat pada kepentingan yang lebih besar terkait pengelolaan sampah di TPA Benowo. Pengelolaan sampah seharusnya tidak dilihat hanya urusan untung-rugi, apalagi sampai dibawa ke ranah politis. Ada kepentingan yang lebih besar dalam pengelolaan sampah, yakni terkait masa depan kota Surabaya menjadi kota yang bersih, sehat dan nyaman untuk ditempati.

Menurut dia, pengelolaan sampah di TPA Benowo sejak awal menggandeng tim luar karena Pemkot memang tidak memiliki pengalaman dalam pengelolaan sampah.

Tim tersebut berasal dari beberapa elemen di antaranya dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri, kalangan akademisi seperti dari Teknik Lingkungan Institut Teknologi 10 November, pakar ekonomi dan hukum, dan juga perkumpulan pengelola sampah.

Tim inilah yang mengurus persoalan teknis seperti penentuan pemenang tender, juga penentuan harga pengelolaan. Sementara Pemkot fokus mengurus masalah sampah. DPRD juga pernah diundang untuk bertemu tim tersebut.

“Kalau ada pertanyaan soal teknis, tanya ke tim ahli kenapa keluar angka (harga) itu, karena mereka yang keluarkan. Saya percaya tim ini karena mereka ahlinya, ada profesor-profesor di situ. Kalau tidak percaya mereka, terus harus percaya ke siapa lagi. Ini sampai sekarang saya tidak tahu pesertanya, yang penting bagi saya itu hasilnya,” ujar Risma yang pernah menjabat Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Surabaya ini.

Risma mengatakan pengelolaan sampah di TPA bukanlah pekerjaan ringan. Urusan TPA disebutnya sangat vital. Bahkan, pengelolaan sampah di TPA lebih kritis ketimbang masalah transportasi. Wali kota menyebut tidak ingin Kota Surabaya nantinya bernasib seperti Kota Bandung yang karena volume sampahnya tak terbendung, kini kesulitan mengatasinya.

Wali kota mempersilakan semua pihak ikut mengawasi pelaksanaan Joint Operation (JO) dalam pengelolaan sampah di TPA Benowo. Bahkan, jika dalam pengelolaan tersebut ditemukan hal-hal yang tidak benar, wali kota tidak keberatan pelaksanaan kerja sama dalam pengelolaan sampah di TPA Benowo itu dievaluasi.

“Silakan diawasi. Kalau ada yang tidak benar, diputus saja

kerja samanya. Saya juga tidak masalah,” katanya.

Direktur Utama PT Sumber Organik Herman mengatakan tidak memasalahkan penolakan tambahan anggaran “tipping fee” pengelolaan sampah karena itu tidak akan mengurangi kinerja PT Sumber Organik (SO). “Kami akan tetap menjalankan pengelolaan sampah TPA Benowo seperti biasa demi warga dan kebersihan Kota Surabaya,” katanya.

Herman menjelaskan, dalam menjalankan kerja selalu mematuhi rambu-rambu kontrak kerja sama yang telah disepakati. Dalam menjalankan pengelolaan sampah TPA Benowo, PT SO selain menjaga kontinuitas juga terus menjalankan tahap pembangunan fasilitas baru pengelolaan sampah.

“Jadi kami ini bekerja dua jalur. Satu jalur mengelola sampah dan jalur satunya lagi membangun fasilitas serta prasarana baru pengolahan sampah. Ini yang mungkin kurang dipahami,” ucap Herman.

Tim ahli pengelolaan sampah TPA Benowo, Guntur Sitorus, mengatakan, *tipping fee* sudah diatur dalam Undang-undang No 18 tahun 2008 tentang kewajiban Pemerintah Daerah menyelenggaraan pengelolaan sampah dan kewajiban mengeluarkan biaya. Pengelolaan sampah di TPA Benowo yang dilakukan oleh investor sudah memenuhi UU tersebut. Besaran biaya pengelolaan sampah, kata Guntur, yang sesuai standar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan sebagainya, mencapai nilai Rp220.000 per ton.

Namun APBD Surabaya pasti tidak akan mampu memenuhi biaya standar tersebut dan hanya mampu menyediakan dana pengelolaan Rp119.000 per ton. Di situ terjadi kekurangan biaya pengelolaan sampah yang bisa disediakan Pemkot Surabaya sehingga investor harus memutar

otak mencari kekurangan itu.

Celakanya, kata Guntur, volume sampah yang dihasilkan kota Surabaya saat ini rata-rata mencapai 1.400 ton per hari, sedangkan anggaran *tipping fee* dalam APBD hanya maksimal 1.300 ton per hari. Artinya, investor harus mencari sendiri kekurangan biaya pengelolaan, baik dari segi anggaran dan kelebihan volume sampah. “Dilihat dari situ saja pasti kesulitan memikirkan menambal kekurangan biaya pengelolaan, apalagi TPA Benowo belum menghasilkan apapun,” kata Guntur.

Oleh karena itu, menurut Guntur, apabila Pemkot nanti meminta hasil penjualan listrik, kompos, plastik, abu untuk bahan baku bata ringan dan sebagainya, maka harus menyediakan “*tipping fee*” sebesar Rp 250.000 per tonnya. Ini karena hasil penjualan listrik dan yang dihasilkan dari pengolahan sampah hanya sebesar 20-30 persen biaya pengelolaan.

“Di sinilah mengapa *tipping fee* pengelolaan sampah harus dianggarkan oleh Pemkot hingga masa kerja sama selama 20 tahun,” kata Guntur.

## **MASIHKAH DIANGGARKAN?**

Permasalahan baru muncul terkait perlu atau tidaknya penganggaran “*tipping fee*” pengolahan sampah TPA Benowo dalam pembahasan RAPBD Surabaya 2014 yang nilainya mencapai Rp61,2 miliar. Sejumlah anggota DPRD Surabaya mempertanyakan hal itu.

Ketua DPRD Kota Surabaya M. Machmud mengatakan akan mengkonsultasikan terlebih dahulu ke Kementerian Dalam Negeri soal anggaran itu. “Kami akan tanya dulu ke Kemendagri seperti apa solusinya,” katanya.

Menurut dia, anggaran pengelolaan sampah tersebut

sudah masuk pos anggaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2014 dan selanjutnya dimatangkan dalam pembahasan RAPBD 2014.

Saat ditanya apakah masih ada peluang penganggaran itu, Machmud mengatakan, berdasarkan informasi sementara yang ia peroleh, dimungkinkan asalkan diatur dalam *memorandum of understanding* (MoU) atau kerja sama tersebut memiliki adendum (ketentuan atau pasal tambahan). "Sehingga kerja sama yang keliru bisa direvisi. Tapi kalau di MoU tidak ada adendum, ya tidak bisa," katanya.

Saat ditanya apakah MoU kali ini ada adendumannya, Machmud mengatakan belum tahu pasti karena belum membaca secara keseluruhan isi dokumen kerja sama itu. "Kayaknya ada, tapi saya tetap perlu konsultasi ke Kemendagri. Bila perlu saya akan mengajak pemkot ke Kemendagri," ujarnya.

Informasi dari internal DPRD Surabaya, Biro Hukum Kemendagri menyatakan ada indikasi penyalahgunaan wewenang dan anggaran terkait kerja sama pengelolaan sampah TPA Benowo senilai Rp362 miliar tersebut. Alasan Kemendagri menyetop proyek ini karena cacat hukum sebab persetujuan kerja sama PT SO dengan Pemkot Surabaya hanya dilakukan atas nama pimpinan dewan (Ketua DPRD Surabaya saat itu Wisnu Wardhana dan Wakil Ketua DPRD Wisnu Sakti Buana), tidak melalui lembaga DPRD Surabaya melalui rapat paripurna.

Kemendagri juga mengingatkan agar DPRD jangan melangkah terlalu jauh mengurus teknis pengelolaan sampah karena hal ini menjadi kewenangan eksekutif. Masalah lain yang disorot adalah kontrak kerja sama antara pemkot dengan



PT Sumber Organik.

Selain itu, Kemendagri menyoroiti Wakil Ketua DPRD Surabaya Wisnu Sakti Buana yang seharusnya tidak boleh merangkap jabatan sebagai panitia khusus pengelolaan sampah. Pansus lalu memenangkan PT SO sebagai pemenang tender. Oleh karena itu, Kemendagri menyarankan keputusan pimpinan DPRD tentang kontrak kerja sama pengelolaan sampah dengan PT Sumber Organik sebagai pihak ketiga dibatalkan dan isinya dievaluasi.

Ketua DPRD Mochammad Machmud membenarkan saran dari Kemendagri soal kontrak kerja sama pengelolaan Sampah TPA Benowo. "Hasil konsultasi ini akan kami sampaikan ke anggota," katanya.

Ia menyebut Kemendagri minta DPRD Surabaya memperbarui persetujuan kontrak kerja sama antara pemkot dengan PT Sumber Organik.

Persetujuan kontrak antara Pemkot Surabaya dengan pihak ketiga sebenarnya sudah ada yakni dengan Nomor 64 tahun 2009 ditandatangani Wakil Ketua DPRD Surabaya Wisnu Sakti Buana. Surat persetujuan ini menindaklanjuti surat wali kota tertanggal 11 November 2008 yang isinya meminta DPRD menyetujui kontrak kerja sama.

Machmud juga membenarkan Kemendagri mengingatkan, dalam persetujuan kontrak yang diperbaharui nanti, dewan tidak boleh mengurus masalah teknis karena jika di kemudian hari ada penyimpangan terkait isi atau teknis kerja sama maka DPRD akan terseret. Lain halnya jika sebatas memberikan persetujuan kerja sama maka dewan tak akan bisa terlibat.

Kepala Bagian Hukum Pemkot Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu saat dikonfirmasi soal hasil konsultasi ke Kemendagri itu, memilih menjawab tidak tahu.



**FATHUL MU'IN** lahir di Sidodadi, 10 Mei 1985. Menamatkan seluruh pendidikan formal sampai jenjang SMA di Wway Kanan, Lampung pada 2003, ia kemudian melanjutkan jenjang perguruan tinggi sarjana di STAIN Jurai Siwo, Metro, Lampung pada 2004. Selanjutnya, gelar magister diraih dari IAIN Raden Intan, Bandar Lampung, Lampung pada 2012.

Sempat tercatat sebagai dosen luar biasa Fakultas Hukum Universitas Megoupak Tulangbawang, Mu'in kemudian beralih profesi menjadi jurnalis di Surat Kabar Harian Lampung Post. Menikahi Nurul Lia Febriati, ia telah dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Azzam Faiza.

Mu'in dapat dihubungi melalui nomor ponsel 08526955540 atau surat elektronik di alamat [muin.lampung10@gmail.com](mailto:muin.lampung10@gmail.com) atau [muin-lampost@yahoo.co.id](mailto:muin-lampost@yahoo.co.id).

# KPU DAN BAWASLU TIDAK TRANSPARAN

*Lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu di Lampung dinilai belum transparan dalam pengelolaan dana pemilu.*

**D**irektur Pusat Studi Strategi dan Kebijakan (Pussbik) Aryanto Yusuf menilai Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Lampung selama ini belum transparan dalam mengelola dana pemilu yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Kedua lembaga tersebut tidak pernah menyampaikan jumlah dana dari pemerintah itu kepada masyarakat.

“KPU dan Bawaslu tidak pernah mengumumkan berapa jumlah anggaran untuk Pemilu 2014 kepada publik. Padahal, itu adalah kewajiban lembaga penyelenggara pemilu itu kepada masyarakat,” kata Aryanto, saat dihubungi, Minggu (22-9).

Menurutnya, KPU dan Bawaslu Lampung juga tidak pernah menyampaikan jumlah anggaran yang sudah terealisasi. Padahal, tahapan pemilu sudah pada tahapan pengumuman daftar pemilih tetap (DPT). Selain menyampaikan jumlah dana, perlu diumumkan juga perincian anggaran setiap tahapan. Diminta atau tidak, lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu wajib mengumumkannya ke publik.

Indikasi KPU dan Bawaslu Lampung tidak transparan

mengelola keuangan, kata dia, dilihat dari papan informasi di kantor serta pada *website* yang disediakan. Pada papan informasi dan *website*, dua lembaga itu tidak pernah mengumumkan besaran dana Pemilu 2014 serta rencana kerja dan anggaran (RKA).

“Mereka (KPU-Bawaslu) punya papan pengumuman dan *website*, tapi tidak pernah mengumumkan anggaran pemilu. Kewajiban tersebut diatur dalam UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi,” ujarnya.

# BAWASLU SIAP TANGGUNG JAWAB DANA RP49 MILIAR

*Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung siap mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran Rp49 miliar untuk pengawasan Pemilu 2014 kepada publik.*

**K**etua Bawaslu Lampung Nazarudin menjelaskan lembaganya mendapat anggaran dari APBN sebesar Rp49 miliar untuk dana pengawasan Pemilu 2014 selama 2013. Ia membantah lembaganya tidak transparan dalam mengelola keuangan.

“Memang anggaran Bawaslu ini tidak kami akses ke publik karena tidak memiliki *website*, yang bisa melakukannya adalah Bawaslu Pusat,” kata Nazarudin, Senin (23-9).

Meski Bawaslu Lampung tidak member akses kepada publik, Nazarudin bersedia menjelaskan perincian jumlah anggaran yang didapat Bawaslu. Jumlah itu untuk honor tiga komisioner Bawaslu Lampung, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) 14 kabupaten/ kota, panitia pengawas kecamatan (panwascam), dan panitia pengawas lapangan (PPL) se-Lampung.

“Selain itu, dana tersebut juga untuk honor PNS yang bertugas di Sekretariat Bawaslu dan Panwaslu,” ujarnya.

Bawaslu yakin penggunaan dana Rp49 miliar sudah sesuai peruntukannya. Pihaknya juga akan mendukung proses

transparansi anggaran, khususnya anggaran Pemilu 2014, kepada publik. “Rencana kerja anggaran (RKA) sebaiknya memang disampaikan kepada publik dan ini bisa dimulai oleh Bawaslu Pusat,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Strategi dan Kebijakan (Pussbik) Lampung Aryanto menegaskan KPU dan Bawaslu Lampung harus mulai membuka diri soal anggaran pemilu. Sebagai lembaga yang memperoleh dari APBN dan APBD, lembaga penyelenggara pemilu itu wajib menyampaikannya kepada publik.

Khusus bagi KPU se-Lampung yang mengusulkan tambahan anggaran untuk Pemilu 2014 sebesar Rp410 miliar kepada KPU Pusat, Pussbik berharap KPU menjelaskan metode penghitungan anggaran tersebut kepada publik.

Hal itu dilakukan agar masyarakat memahami, sekaligus mengoreksi apakah jumlah besaran anggaran tersebut relatif sudah sesuai atau malah terlampau besar. “Basis metode penghitungannya harus disampaikan kepada masyarakat. Jadi jangan tiba-tiba muncul angka Rp410 miliar tapi mereka tidak mampu menjelaskannya kepada publik,” kata dia.

# MAKSIMALKAN FUNGSI WEBSITE

*Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Lampung diminta mewujudkan keterbukaan informasi publik dengan memaksimalkan pengelolaan website resmi instansi masing-masing.*

**P**engamat politik Universitas Lampung, Dedy Hermawan, menjelaskan sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu Lampung belum memanfaatkan sarana teknologi informasi secara baik. Bahkan, keduanya cenderung tidak bisa memanfaatkan *website* resminya untuk memberikan informasi aktual kepada masyarakat.

“KPU dan Bawaslu Lampung itu kan lembaga penyelenggara pemilu, kenapa *website*-nya tidak digunakan dengan baik. Banyak informasi aktual, termasuk masalah penggunaan anggaran di instansi itu, yang ingin diketahui masyarakat,” ujar Dedy Hermawan, Selasa (24-9).

Seperti diketahui, KPU Lampung memiliki *website* resmi <http://www.kpud-lampungprov.go.id/>. Sementara Bawaslu Lampung belum memiliki *website* resmi, tetapi hanya blog dengan alamat <http://bawaslulampung.blogspot.com>.

Dedi menambahkan berdasarkan pemantauannya, *website* KPU Lampung terakhir kali memperbarui informasi pada Senin, 26 Agustus 2013, informasi tentang daftar calon tetap (DPT). Lalu, Bawaslu Lampung terakhir meng-up-

*date* informasi pada 24 Mei 2013 tentang pengumuman hasil seleksi panitia pengawas kecamatan. “Lihat saja di dua alamat itu informasi terbaru tentang pemilu ada atau tidak. Rencana kegiatan anggaran (RKA) Pemilu 2014 ada atau tidak?” kata dosen FISIP Unila itu.

Kepala Pusat Studi Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unila itu menambahkan KPU dan Bawaslu Lampung memiliki kewajiban memberikan informasi tentang pemilu kepada masyarakat. Bahkan, dua lembaga penyelenggara pemilu itu juga wajib menyampaikan penggunaan dana pemilu kepada publik.

“Sebagai bentuk transparansi anggaran, seharusnya situs milik KPU dan Bawaslu Lampung ini juga harus menampilkan berapa jumlah anggaran untuk Pemilu 2014, sekaligus pertanggungjawaban penggunaannya.”

## **SIAP PUBLIKASI**

KPU Lampung siap memublikasikan penggunaan pagu indikatif dana Pemilu Legislatif 2014 sebesar Rp410,205 miliar. Sebanyak 14 KPU kabupaten/kota dan provinsi akan memublikasikannya melalui situs resminya.

“Kami siap memberikan data-data tersebut (anggaran) bila ada masyarakat yang membutuhkan. Kalau perlu, kami publikasikan di situs milik KPU,” kata Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono, kemarin (24-9).

Dana Pemilihan Umum Legislatif 2014 dari KPU Pusat sebesar Rp410,205 miliar, berdasarkan hasil rapat koordinasi KPU se-Lampung di Hotel Novotel, Kamis (19-9), menurut Nanang, merupakan plafon anggaran dari KPU Pusat. “Itu sebenarnya bukan usulan kami seperti yang diberitakan selama ini, itu plafon dari KPU Pusat,” kata dia.



Menurut dia, KPU Pusat memberikan plafon tersebut berdasarkan data penggunaan dana pemilihan umum legislatif di Lampung pada tahun sebelumnya. “Jadi, jumlah Rp410,205 miliar itu masih indikatif, bisa lebih atau berkurang. Bulan depan baru bisa diketahui berapa jumlah final dana pemilihan umum legislatif yang dibutuhkan Lampung.

Dari total pagu indikatif KPU 14 kabupaten/kota, usulan terbesar ke KPU pusat masih dari KPU kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah Rp49,512 miliar. Sementara usulan yang terkecil adalah KPU Kota Metro Rp11,309 miliar, sedangkan KPU Provinsi Lampung mengusulkan Rp21,433 miliar lebih.



**DENI BACHTIAR.** Itulah nama jurnalis Koran Sindo yang lahir di Majalengka 9 Desember 1982 ini. Melalui karya tulis yang mengangkat tentang anggaran pengelolaan limbah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya, tulisannya meraih penghargaan terbaik dalam bea siswa Kursus Anggaran yang digelar AJI Surabaya.

Bapak satu anak ini telah tertarik pada dunia jurnalisme sejak lama. Ia bercita-cita menjadi jurnalis. Saat mahasiswa dia telah aktif di pers kampus di Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Merdeka Malang.

Bergabung di Sindo sejak 2008, ia sebelumnya bekerja di Harian Surya pada 2007. Saat ini jurnalis kalem ini menetap di Jalan Mertojoyo Blok G-5 Kota Malang. Dan kalau mau menghubunginya bisa dinomor 081333669449.

# HASIL PROPER TEST BLH JATIM DAN KLH RI

**\*RAPOR MERAH UNTUK RSUD DR SOETOMO**

**H**al memalukan menimpa rumah sakit kebanggaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pengelolaan RSUD dr Soetomo Surabaya masuk kategori merah berdasarkan proper test yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jawa Timur.

Dalam proper test KLH RI, RSUD dr Soetomo Surabaya menduduki peringkat 142 dari 147 perusahaan atau instansi yang dinilai. Sedangkan dalam hasil proper test oleh BLH Jatim, dari 4 kegiatan/ usaha milik pemerintah, RSUD dr Soetomo menempati urutan ketiga dengan kategori merah. Kategori pertama dan kedua adalah PT PIER dan PT SIER yang sama-sama biru. Sementara urutan keempat adalah RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto yang masuk kategori hitam.

Selain 4 kegiatan/ usaha milik pemerintah, ada juga hasil penilaian untuk 3 hotel. Yakni Hotel Sheraton Surabaya kategori biru, Hotel Shangri-La kategori merah, dan Hotel JW Marriot kategori hitam.

Hasil proper pengelolaan lingkungan ini jelas mencoreng sederet prestasi rumah sakit kebanggaan Gubernur Jatim Soekarwo itu yang merupakan rumah sakit tipe A, rumah sakit

pendidikan, dan rujukan utama di Jatim, bahkan Indonesia timur.

Sayangnya, Direktur RSUD dr Soetomo Surabaya dr Dodo Anondo MPH enggan dikonfirmasi terkait hasil proper test tersebut. Meski koran ini mencoba menemui di kantornya, Dodo tetap enggan memberikan penjelasan.

Berbeda dengan RSUD dr Soetomo, Hotel JW Marriott Surabaya memberikan keterangan soal hasil proper test tersebut. Asisten Marketing Communication Manager Levina Inggita mengatakan hasil proper test tersebut menjadi bahan evaluasi. Setelah hasil proper test itu diketahui hitam, mereka langsung melakukan pembenahan pengelolaan lingkungan. "Kami sudah alokasikan anggaran sekitar Rp200 juta untuk pembenahan," ujarnya saat dikonfirmasi Jumat lalu.

Levina menyatakan, JW Marriott sebenarnya memiliki standar internasional dalam pengelolaan lingkungan. Selama kurang lebih 10 tahun beroperasi di Surabaya, JW Marriott Surabaya seringkali menggelar acara bertaraf internasional. Jika pengelolaan lingkungan buruk, tidak mungkin penyelenggara acara menggunakan JW Marriott sebagai lokasi acara. "Faktanya mereka menggunakan tempat kami karena memang standar kami, termasuk pengelolaan lingkungan, adalah standar internasional."

Terkait dengan hasil proper test yang hitam, perempuan asli Surabaya ini menyatakan ada beberapa hal yang harus dicocokkan dengan standar Kementerian Lingkungan hidup RI. April lalu, Marriott sudah menyerahkan berkas perbaikan. Setelah itu, JW Marriott mendapatkan surat ketaatan perundang-undangan dan peraturan Kementerian Lingkungan Hidup RI.

"Proper test ini kan relatif baru, sedangkan kami

sudah beroperasi lama. Jadi mungkin kami hanya tinggal mencocokkan saja. Kami optimistis nanti bisa mendapatkan predikat biru atau hijau,” kata Levina.

Terpisah, anggota Komisi D (Pembangunan) DPRD Jatim Nizar Zahro sangat menyayangkan adanya instansi milik pemerintah yang pengelolaan lingkungannya buruk. Dia mendesak Gubernur Jatim memberikan peringatan yang keras kepada instansi yang dimaksud. “Harapannya, mereka segera melakukan perbaikan sehingga ada perbaikan pada penilaian tahun berikutnya,” katanya.

## **HASIL PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

### **HASIL PROPER TEST KLH RI**

Total Peserta	147
Emas	2
Hijau	6
Biru	109
Merah	25
Hitam	5

### **HASIL PROPER TEST BLH JATIM**

Total Peserta	74
Emas	2
Hijau:	6
Biru	63
Merah	2
Hitam	1

### **REKAP HASIL PROPER TEST KEGIATAN HOTEL**

1. Hotel Sheraton Surabaya (Biru)
2. Hotel Shangri-La Surabaya (Merah)
3. Hotel JW Marriot Surabaya (Hitam)

### **REKAP HASIL PROPER TEST KEGIATAN/ USAHA MILIK PEMERINTAH**

1. PT PIER Pasuruan (Biru)
2. PT SIER Surabaya (Biru)
3. RSUD dr Soetomo Surabaya (Merah)
4. RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto (Hitam)

# RSU DR SOETOMO TAK PRIORITASKAN KELOLA LIMBAH

**\*ANGGARAN KALAH DENGAN PERAWATAN AC**

*RSU dr Soetomo Surabaya tak memprioritaskan pengelolaan lingkungan. Buktinya, anggaran pemeliharaan instalasi pengolahan limbah relatif kecil.*

**D**alam RKA (Rencana Kerja Anggaran) APBD Jatim 2014, RSUD dr Soetomo Surabaya hanya mengalokasikan Rp907 juta saja. Selain itu, tak ada anggaran pembelian insenerator meski usianya sudah tua. Tiga insenerator yang dimiliki, ada yang beroperasi sejak 2001, ada yang sejak 1995, dan satu insenerator lagi bahkan lebih lama dari itu.

Anggaran pengelolaan lingkungan itu, jauh lebih kecil dari pos anggaran lainnya. Misalnya saja, untuk pemeliharaan air conditioning Rp1,68 miliar, pengadaan percetakan administrasi dan surat menyurat Rp2,35 miliar, dan pemeliharaan kendaraan dinas Rp1,29 miliar. Jumlah yang mengherankan adalah pos anggaran untuk penyediaan jasa kebersihan kantor Rp5,89 miliar.

Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur Bambang Suhartono menuding,

kecilnya anggaran pengelolaan lingkungan menunjukkan ketidakseriusan RSUD dr Soetomo. Padahal, dalam proper test Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jatim, RSUD dr Soetomo mendapatkan predikat merah. “Kalau memang serius, minimal merevitalisasi pengelolaan limbahnya. Itu kan (pengelolaan limbah) sudah kuno untuk sekelas rumah sakit tipe A,” katanya kemarin.

Menurut dia, rumah sakit harusnya mengedepankan kebersihan lingkungan. Apalagi RSUD dr Soetomo Surabaya merupakan rujukan utama Jatim, bahkan wilayah Indonesia Timur. Selain itu, RSUD dr Soetomo juga rumah sakit pendidikan. “Pengelolaan lingkungan, termasuk pengolahan limbah merupakan hal dasar bagi rumah sakit. Ini harus didahulukan,” kata Bambang yang juga Ketua Komisi D (Pembangunan) DPRD Jatim ini.

Kepala Instalasi Sanitasi Lingkungan RSUD dr Soetomo Surabaya Dateng SKM mengakui anggaran pemeliharaan instalasi pengolahan limbah memang kurang. Pada periode proper 2011-2012, salah satu kekurangannya adalah biaya untuk uji emisi insenerator. “Harusnya uji emisi insenerator dilakukan 4 kali dalam setahun. Tapi karena anggarannya tidak ada, cuma dua kali saja,” katanya.

Dateng menyebutkan, uji emisi insenerator ini dilakukan oleh pihak ketiga (swasta). Biaya untuk sekali uji emisi insenerator Rp12 juta. Jika setiap insenerator melakukan uji emisi empat kali setahun, biaya yang dibutuhkan Rp48 juta. RSUD dr Soetomo memiliki tiga insenerator, maka dibutuhkan biaya Rp144 juta.

Namun untuk proper 2012-2013, RSUD dr Soetomo sudah melakukan pembenahan yakni dengan mengalokasikan anggaran untuk uji emisi tiga insenerator itu empat kali dalam

setahun. “Tahun ini sudah ada anggarannya,” kata dia.

Terkait usia insenerator, Dateng memastikan kondisinya masih baik. Saat dilakukan pemeriksaan, hasilnya masih memenuhi syarat. “Kemarin masih bagus. Parameternya bagus semua,” katanya.

Dalam catatan koran ini, tiga insenerator itu beberapa kali mengalami kerusakan. Terakhir yang pernah terungkap adalah pada Februari 2013 lalu. Saat itu insenerator sebelah utara, mengalami kerusakan di pintu, sementara insenerator tengah dan selatan batu apinya lepas.

Saat itu, tumpukan sampah sempat menggantung sampai memakan lahan parkir di dekatnya dan menebarkan bau tak sedap. Insenerator digunakan untuk membakar limbah medis padat berupa jarum suntik bekas pakai, botol, ampul, vial, spuit, kapas, kasa, pembalut, kantong infus, dan jaringan tubuh.

Sementara itu, Kepala BLH Jatim Indra Wiragana menyatakan setiap hasil proper test, ada berita acara dan rekomendasi pembenahan. Tahun berikutnya, pihaknya akan melakukan pengecekan lagi. “Kalau predikatnya tetap hitam atau merah, berarti pembenahan belum optimal,” katanya.

Kategori hitam dan merah, kata dia, merupakan yang terburuk. Jika dua kali proper berturut-turut termasuk kategori itu, maka instansi yang bersangkutan tak akan diikutsertakan kembali dalam proper berikutnya. “Kalau dua kali berturut-turut, berarti tak ada pembenahan. Kami keluarkan dari proper test,” katanya.

Menurut Indra, kategori hitam dan merah, sebenarnya cukup alasan untuk ditingkatkan menjadi pidana. BLH dan KLH akan bekerjasama dengan Polda melakukan penyelidikan untuk melakukan operasi tangkap tangan. “Tapi itu ada



mekanismenya," ujarnya.

Indra tidak akan tebang pilih dalam penegakan aturan. Institusi pemerintah maupun swasta akan diperlakukannya secara adil. Jika tidak taat aturan, BLH akan melakukan tindakan lebih lanjut. "Nilainya harus sempurna. Satu item penilaian jelek, maka institusi yang bersangkutan tidak lulus," kata Indra.

## SAMPAH RSU DR SOETOMO KEMBALI MENGGUNUNG

*Sampah medis RSU dr Soetomo Surabaya kembali menggunung. Penyebabnya adalah kerusakan insinerator atau mesin pembakar sampah.*

**R**umah sakit milik Pemprov Jatim itu memiliki tiga unit insinerator. Insinerator pertama mengalami kerusakan permanen sejak tiga bulan lalu. Sedangkan insinerator kedua mengalami kerusakan selama dua hari. Praktis, hanya insinerator ketiga yang beroperasi membakar seluruh sampah RSU dr Soetomo.

Kepala Instalasi Sanitasi Lingkungan RSU dr Soetomo Surabaya Dateng SKM mengatakan kerusakan dua insinerator itu memang mengganggu proses pembakaran sampah. Mereka tak bisa lagi membakar seluruh sampah dalam sehari. “Tumpukan sampah itu memang karena insinerator kami mengalami kerusakan,” ujarnya kemarin.

Menurut Dateng, dalam sehari ada 1.200 kilogram sampah medis RSU dr Soetomo. Sampah sebanyak itu sebenarnya dapat tertangani dengan dua unit insinerator. Namun pekan lalu, insinerator nomor dua mengalami kerusakan di bagian sumbunya sehingga tak dapat beroperasi selama dua hari. “Jadi sampah-sampah yang menumpuk itu merupakan sisa-sisa pekan lalu. Karena insinerator kedua rusak selama dua

hari," katanya.

Saat tiga unit insinerator berfungsi semua, tidak hanya sampah medis RSUD dr Soetomo yang dibakar, tapi juga sampah kiriman dari rumah sakit atau instansi lain. Dalam sehari, insinerator itu mampu beroperasi empat sampai lima kali. Namun sejak tiga bulan lalu, saat insinerator nomor satu rusak permanen, RSUD Soetomo menyetop menerima sampah dari luar.

Dateng mengungkapkan, insinerator nomor satu memang sudah berusia puluhan tahun. Namun beberapa tahun lalu pernah dimodifikasi oleh tim dari Institut Teknologi 10 November, Surabaya.

Dalam catatan koran ini, tiga insinerator itu beberapa kali mengalami kerusakan. Terakhir yang pernah terungkap adalah pada Februari 2013 lalu. Saat itu insinerator nomor satu, mengalami kerusakan di pintu, insinerator nomor dua batu apinya lepas, insinerator nomor tiga juga batu apinya yang lepas. Insinerator nomor dua dan tiga sudah berusia di atas 15 tahun.

Akibat kerusakan itu, tumpukan sampah medis sempat menggunung sampai memakan lahan parkir di dekatnya. Tumpukan sampah itu menebarkan bau tak sedap karena tersiram hujan. Insinerator digunakan untuk membakar limbah medis padat berupa jarum suntik bekas pakai, botol, ampul, vial, spuit, kapas, kasa, pembalut, kantong infus, dan jaringan tubuh sisa operasi.

Sementara itu, Direktur RSUD dr Soetomo Surabaya dr Dodo Anondo MPH akhirnya mengalokasikan anggaran untuk pembelian satu unit insinerator baru. Hal ini dilakukan setelah Gubernur Jatim Soekarwo menegurnya.

Menurut Dodo, alokasi dana untuk pembelian satu unit

insinerator baru Rp5 miliar. Pembelian dilakukan dengan menggunakan APBD Jatim 2014. “Kalau tendernya lancar, Maret atau April 2014 bisa segera dioperasikan,” katanya.